

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lisnan Baihaki

NIM : 082144018

Fakultas/Prodi : Dakwah/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat

Semester : IX (Sembilan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PANGAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA GUNUNGMALNG KECAMATAN SUMBERJAMBE”**. Adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benanya.

Jember, 02 November 2018

Yang membuat



Lisnan Baihaki  
NIM. 082 144 018

**EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS SEJAHTER DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PANGAN BAGI  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA  
GUNUNGMALANG KECAMATAN SUMBERJAMBE**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Fakultas Dakwah

Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Desember 2018

**Tim Penguji**

Ketua



Ninuk Indrayani, M.Pd  
NIP. 19780210 200912 2 002

Sekretaris



David Ilham Yusuf, M.Pd  
NUP. 201603113

Anggota

1. Dr. Ahidul Asror, M.Ag

2. Zainul Fanani, M.Ag



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Ahidul Asror, M.Ag  
NIP. 19740606 200003 1 003

**EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS SEJAHTER DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PANGAN BAGI  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA  
GUNUNGMALANG KECAMATAN SUMBERJAMBE**

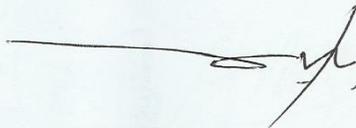
**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

Lisnan Baihaki  
Nim.082144018

Disetujui Pembimbing



H. Zainul Fanani, M. Ag  
NIP.1971072272005011001

**EFEKTIFITAS PROGRAM BERAS SEJAHTER DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PANGAN BAGI  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA  
GUNUNGMALANG KECAMATAN SUMBERJAMBE**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

**Lisnan Baihaki**  
NIM: 082144018

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
DESEMBER 2018**

## ABSTRAK

**Lisnan Baihaki, 2018** : *Efektifitas Program Beras sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe.*

Program beras sejahtera bagi masyarakat yang berpendapatan rendah adalah merupakan program nasional untuk membantu serta mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. pemerintah membuat kebijakan yang berawal dari krisis moneter pada tahun 1998 yang merupakan awal dari pelaksanaan program ini dimulai yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin. Pada tahun 2018 merupakan awal dari peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial yang mana tidak terdapat harga atau biaya tebus yang harus dibayar oleh KPM.

Fokus Penelitian ini di antaranya: 1) Bagaimana Efektifitas Sistem Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe? 2) Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Sasaran Program Beras Sejahtera dalam meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Gunungmalang?. Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mengetahui efektifitas sistem distribusi program beras sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe. 2) untuk mengetahui respon masyarakat terhadap sasaran program beras sejahtera dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut Merriam ada dua tahap dalam menganalisis data yaitu sewaktu pengambilan data dan setelah pengambilan data. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) sistem distribusi beras sejahtera di Desa Gunungmalang kurang efektif dikarenakan adanya beberapa data dari pusat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima. 2) banyaknya respon dari masyarakat yang mampu secara perekonomiannya agar pembagian beras sejahtera disamaratakan tanpa tebang pilih.

Kata Kunci, Efektivitas Program Beras Sejahtera, Kesejahteraan Pangan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Definisi Istilah .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	20
1. Tinjauan tentang efektivitas .....	20
2. Kesejahteraan pangan .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Objek Penelirian.....	30
E. Waktu Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Analisis Data.....	35
H. Keabsahan Data.....	37
I. Tahap-Tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	39
B. Penyajian Data dan Analisis .....	48
C. Pembahasan Temuan.....	66
1. Efektivitas sistem distribusi program beras sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe .....	67
2. Respon masyarakat terhadap sasaran program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunungmalang.....	82

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Jurnal Penelitian	
2. Surat Izin Penelitian Skripsi	
3. Surat Selesai Penelitian Skripsi	
4. Dokumentasi	
5. Biodata Penulis	

**IAIN JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang kebal dari kemiskinan. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus bisa ditanggulangi.<sup>1</sup>

Masyarakat miskin atau masyarakat kecil itu adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan. Dengan demikian, kemiskinan itu merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan multi dimensi, serta sangat potensial melahirkan ketimpangan, pengangguran, dan berbagai tindak kejahatan atau kriminalitas.<sup>2</sup>

Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat ini terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bandung: ALFABETA. 2009). 14.

<sup>2</sup> Asep Usman Ismail. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. (Tangerang: Lentera Hati, 2012). 42.

11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk.<sup>3</sup> Diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 178 juta orang yang tidak mampu membayar perawatan kesehatan, 100 juta diantaranya jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.<sup>4</sup> Pada 2016 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan mencapai 10,64 persen. Sementara pada 2017 turun menjadi 10,12 persen dan pada tahun 2018 ini pemerintah menargetkan angka kemiskinan akan menurun di bawah 10 persen. 10, 12 persen itu kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Dalam hal ini kepala Badan Perencanaan Nasional Bambang Brodjonegoro optimis bahwa program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat harus benar-benar tepat sasaran, karena kemarin rastra dan subsidi banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlahnya.<sup>5</sup>

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.<sup>6</sup> Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat

---

<sup>3</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan sosial*. (Bandung: ALFABETA. 2015). 54.

<sup>4</sup>Ibid, 10.

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/01/03/tahunini.pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-di-bawah-10-persen>. diakses pada 03-04-2018, pukul 19.46. Wib.

<sup>6</sup>Pedoman Umum Subsidi Rastra, (Jakarta. 2017). 3.

berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.<sup>7</sup>

Kebijakan program beras sejahtera juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Diantarabentuk program bantuan pemerintah tersebut adalah beras miskin (RASKIN) atau beras sejahtera (RASTRA) yang telah diterima masyarakat sejak tahun 1998. Dalam pelaksanaan raskin pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran, serta penyesuaian harga tebus raskin di titik distribusi dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg.<sup>8</sup> Program raskin pada bulan september 2015 telah diganti nama menjadi program beras sejahtera oleh menteri sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.<sup>9</sup> Beras sejahtera strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan mendasar dalam

---

<sup>7</sup>Pedoman Umum Subsidi Rastra, (Jakarta. 2017). 4.

<sup>8</sup>Fraike Rumondor, *Efektivitas Program Beras Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. 2.

<sup>9</sup>Ibid, 2-3.

pelaksanaannya, yaitu pada bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebus yang harus dibayar oleh keluarga penerima manfaat (KPM).<sup>10</sup>

Pada pelaksanaan penyaluraan, Perum BULOG mendapat tugas untuk mendistribusikan bansos Rastra hingga Titik Distribusi (TD). Kemudian pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendistribusian ke Titik bagi (TB). Diharapkan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap tanggal 25 setiap bulannya, kecuali pada wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis, transportasi dan keterbatasan sarana lainnya.<sup>11</sup>

Bantuan program beras sejahtera ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat miskin yang sesuai dengan semangat ajakan Al-qur'an terhadap manusia untuk memperhatikan kaum dhuafa (lemah) dan orang-orang miskin, yang terdapat dalam surat al- Ma'un sebagaiberikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya : “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin”. (QS. al-Ma'un [107]:1-3).<sup>12</sup>

Maksud dari surah al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak menghiraukan anak-anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin dan termasuk kategori sebagai pembohong agama,

<sup>10</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta. 2018). iv.

<sup>11</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta. 2018). iv.

<sup>12</sup>Asep Usman ismail. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan sosial*. (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 37.

padahal ayat tersebut telah jelas menganjurkan bahwa setiap umat manusia untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Bahkan M Quraish Shihab dalam tafsir Al-quran Al Karim paling tidak ada dua hal yang patut disimak dalam ayat 3 surat ini. *Pertama* ayat tersebut tidak berbicara tentang kewajiban “memberi makan” orang miskin saja, yang *kedua* juga berarti berbicara “menganjurkan memberi makan”. Itu berarti mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun dituntut pula untuk berperan sebagai “penganjur pemberi makanan terhadap orang miskin”. Atau dengan kata lain, kalau tidak mampu secara langsung, minimal kita menganjurkan orang-orang yang mampu untuk memperhatikan nasib mereka.<sup>13</sup>

Secara eksplisit ayat tersebut diatas mengajak kepada umat manusia agar berbuat kebajikan untuk membantu masyarakat miskin. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat sebuah program Raskin yang kini telah berganti nama menjadi RASTRA (beras sejahtera) yang telah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter pada tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Penentuan kriteria penerima manfaat raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama

---

<sup>13</sup><https://subhiceria.wordpress.com/tafsir-al-maun>. Diakses pada 03-04-2018, pukul 19.15. Wib.

rumah tangga miskin.<sup>14</sup> Program beras miskin (RASKIN) kini telah berganti nama menjadi beras sejahtera (RASTRA), RASTRA merupakan program yang sama dengan RASKIN hanya yang membedakan adalah sebutan untuk program tersebut. Program RASKIN memang tidak akan mampu menghilangkan kemiskinan. Karena program-program tersebut tidak dirancang untuk merespon apalagi mencabut “akar” kemiskinan. Melainkan, sekedar mengurangi kerentanan dan kesengsaraan.<sup>15</sup>

Sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya yang kurang mampu adalah memberikan bantuan beras sejahtera (RASTRA) yang dulu bernama beras miskin (RASKIN) yang sebenarnya bantuan ini khusus masyarakat yang benar-benar kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kenyataannya dilapangan tidaklah demikian, sebab masih banyaknya data yang tidak akurat. Artinya data yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak orang mampu yang mendapatkan bantuan program beras sejahtera ketimbang masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan kebijakan publik di Indonesia bisa dikaji dari rendahnya komitmen dan keberpihakan para perumus kebijakan dan penyelenggara negara.<sup>16</sup>

Indonesia masih banyak kebijakan publik yang memihak orang kaya (*pro-rich*), ketimbang memihak orang miskin (*pro-poor*). Padahal,

---

<sup>14</sup>[www.bulog.co.id/sekilas-raskin.php](http://www.bulog.co.id/sekilas-raskin.php). diakses pada 16-11-2017, pukul 06.15. Wib.

<sup>15</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bandung: ALFABETA.2009).7.

<sup>16</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bandung: ALFABETA. 2009). 38.

sebagai sebuah perangkat *governance* yang penting, kebijakan publik seharusnya lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya. Selain karena jumlah orang miskin di Indonesia sangat besar, orang kaya memiliki sumberdaya untuk menolong dirinya sendiri. Mereka memiliki kemampuan yang lebih besar dan pilihan yang lebih luas ketimbang orang miskin.<sup>17</sup>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Sosial Protection*), dimana Kebijakan Program Rastera termasuk didalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin atau rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastera.

Kebijakan program Rastera juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>17</sup>Ibid, 39.

1945.<sup>18</sup> Disamping itu pula program beras sejahtera ini mempunyai beberapa manfaat,<sup>19</sup> yaitu:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (disalurkan tanpa biaya tebus) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan beras sejahtera (RASTRA) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680). Serta mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.<sup>20</sup>

Presiden mengintruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur/walikota

<sup>18</sup>Pedoman Umum Subsidi Rastra, (Jakarta: 2017). 3.

<sup>19</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta: 2018). 3.

<sup>20</sup>Ibid. 5-7.

diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.<sup>21</sup> Mengacu pada perundang-undangan tersebut Rrogram Beras Sejahtera (RASTRA) mempunyai Ketentuan Umum dalam Proses pelaksanaannya kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Titik Distribusi (TD).<sup>22</sup>

Program Rastra merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatn rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.<sup>23</sup>

Kenyataannya dilapangan Program Beras Sejahtera yang telah berjalan dalam beberapa tahun ini masih banyak ditemukan beberapa masalah yang lebih khusus pada sistem pendistribusiannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Imam Sutaji Sekretaris Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe,<sup>24</sup> bahwa ada beberapa kendala dalam pendistribusian beras sejahtera ini yang diantaranya adalah ketidak tepatan waktu, yang mana kadangkala pendistribusian Rastra mengalami keterlambatan. Dan juga tidak tepatnya sasaran yang artinya masih banyak

---

<sup>21</sup>Ibid. 3.

<sup>22</sup>Ibid. 7-8.

<sup>23</sup>Ibid. 4.

<sup>24</sup>Imam Sutaji, Wawancara, Gunungmalang, 26 April 2018.

penerima program beras sejahtera yang bukan masyarakat yang memiliki kriteria untuk mendapatkan RASTRA, karena mereka memang mendapatkan data atau jatah dari pihak pemerintah secara langsung.

Beras sejahtera (RASTRA) diberikan dalam bentuk beras fisik dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kuantitas beras yang disalurkan adalah sebesar 10 kg dengan kualitas beras medium, yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen.<sup>25</sup>

Sementara dari hasil wawancara dengan Khoiri selaku Kasi Pelayanan Desa Gunungmalang,<sup>26</sup> mengatakan bahwa pelaksanaan Program beras sejahtera (RASTRA) di berbagai daerah di Indonesia juga mengalami hal sama, yaitu mengalami ketidak tepatan pembagian program beras sejahtera seperti ketidaktepatan sasaran penerima rastra, keterlambatan waktu distribusi, serta terkadang beras yang berbau dan membuat penerima merasa kurang puas.

Hasil dokumentasi Desa Gunungmalang didapat data jumlah penduduk laki-laki 3.743 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.794 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.841 dengan jumlah masyarakat penerima bantuan Program Beras Sejahtera sebanyak 11.86 Kepala Keluarga (KK).<sup>27</sup> Dan setelah dilakukan wawancara lebih lanjut dengan Khoiri Kasi Pelayanan Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe,

<sup>25</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, 2018. 19.

<sup>26</sup>Khoiri, Wawancara, Gunungmalang. 9 Mei 2018.

<sup>27</sup>Dokumentasi, Gunungmalang. Mei 2018.

didapat ada beberapa masalah serta juga kebijakan pemerintah desa sendiri dalam pendistribusian Program Beras Sejahtera kepada masyarakat di Desa Gunungmalang, yang diantaranya:<sup>28</sup>

1. Adanya permintaan dari masyarakat yang tidak dapat bantuan Program Beras Sejahtera (RASTRA) agar di bagi rata.
2. Adanya data penerima dari pemerintah pusat bahwa yang bersangkutan masuk dalam kategori keluarga yang mampu dan tidak berhak menerima, akan tetapi yang bersangkutan tetap menginginkan bantuan tersebut.
3. Banyaknya ketidakpahaman masyarakat tentang sistem penyaluran beras sejahtera ini karena tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan bantuan program tersebut.
4. Adanya ketidaktepatan pendistribusian dari pihak Perum BULOG sendiri yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga tidak dapat dipastikan setiap bulan didistribusikan.
5. Adanya kualitas beras sejahtera (RASTRA) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sering ditemukan beras bau dan berketu serta beras yang pecah-pecah, berwarna kekuningan.
6. Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan tersebut bahwa pemerintah Desa Gunungmalang juga membuat kebijakan sendiri, yaitu penerima bantuan program beras sejahtera ini setiap bulannya diberlakukannya sistem bergantian, hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan

---

<sup>28</sup>Khoiri, Wawancara, Gunungmalang. 9 Mei 2018.

kecemburuan sosial dimasyarakat dengan harapan masyarakat menjadi aman dan tentram.

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa sebenarnya ketidak efektifan program beras sejahtera ini ternyata memang dari pihak penyelenggara Rastra sendiri, dimana banyak data yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengenai jumlah penerima bantuan program beras sejahtera ini masih banyak masyarakat yang tergolong mampu dan tidak berhak menerimanya.

Hal ini tentunya tidak sesuai atau dapat dikatakan adanya kesenjangan yang tidak sesuai dengan harapan serta kenyataan dilapangan, yang masih belum optimalnya efektifitas pendistribusian program beras sejahtera (RASTRA) yang disebabkan oleh beberapa permasalahan-permasalahan seperti di atas, sehingga keberhasilan program beras sejahtera secara umum dapat dikatakan masih belum sesuai dengan sasaran serta tujuan yang ditetapkannya kebijakan program beras sejahtera oleh pemerintah. Dengan melihat permasalahan yang terjadi di Desa Gunungmalang ini, sehingga membuat peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul EFEKTIFITAS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PANGAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA GUNUNGMALANG KECAMATAN SUMBERJAMBE.

## B. Fokus Penelitian

Unsur penting dalam setiap laporan penelitian adalah kejelasan perumusan fokus dan tujuan penelitian.<sup>29</sup> Pada fokus penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah harus jelas dan tegas sehingga keseluruhan proses penelitian terarah dan fokus. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas sistem distribusi program beras sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap sasaran program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunungmalang?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>30</sup> Pada tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah yang menimbulkan hambatan dan mencari cara-cara penanggulangan hambatan itu, supaya usaha yang dilakukan dapat berhasil secara maksimal.<sup>31</sup> Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas sistem distribusi program beras sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe.
2. Untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap sasaran program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi

<sup>29</sup>Hasan, Muhammad Tholchah dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Lembaga Penelitian Islam Malang kerjasama dengan Visipres, 2002). 191.

<sup>30</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

<sup>31</sup>Narbuko Chalid, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2007). 45.

masyarakat kurang mampu di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>32</sup> Adapun manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu literatur dan sumbangan bagi disiplin ilmu terkait dengan pentingnya program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui beras sejahtera.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai calon pengembangan masyarakat khususnya dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan tentang program pemerintah yang berupa beras sejahtera.

###### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi dan informasi bagi mahasiswa sebagai calon peneliti selanjutnya.

---

<sup>32</sup>Ibid, 45.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian<sup>33</sup>. Disini akan dipertegas terhadap istilah dalam judul tersebut, yakni sebagai berikut:

### 1. Efektivitas Program Beras Sejahtera

Efektivitas program beras sejahtera merupakan program dari pemerintah untuk mensejahterakan pangan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dengan maksud dan tujuan agar bantuan beras sejahtera tepat sasaran pada keluarga penerima manfaat (KPM).

### 2. Kesejahteraan Pangan

Kesejahteraan pangan adalah upaya meningkatkan ketahanan pangan yang diberikan pada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangannya, dengan harapan sehari bisa makan dua atau tiga kali.

### 3. Masyarakat Kurang Mampu

Adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh kementerian Negara/Lembaga.<sup>34</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan format penulisan deskriptif.<sup>35</sup>

### Bab I PENDAHULUAN

<sup>33</sup>Ibid, 45.

<sup>34</sup>Ibid, 7.

<sup>35</sup>Tim Penyusun, *pedoman karya ilmiah*. (Jember. IAIN Jember press. 2017). 48.

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

## **Bab II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## **Bab III METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta tahapan penelitian.

## **Bab IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

## **Bab V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>36</sup> Dalam hal ini maksudnya adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mempunyai fokus penelitian, kata, atau kata-kata kunci yang sama.<sup>37</sup> Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan program beras miskin atau sekarang yang telah berganti nama menjadi beras sejahtera, antara lain sebagai berikut:

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Soni Wibowo, judul skripsi “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan program beras sebagai kajian utama	Pada penelitian Soni Wibowo ini lebih fokusnya pada persepsi masyarakat miskin yang menerima bantuan program

<sup>36</sup>Ibid, 45.

<sup>37</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: UMM Press, 2010). 35

	Di Desa Bumi Kencana Kecamatan Seputih Lampung Tengah”		beras untuk kebutuhannya. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas ketepatan penyaluran program bantuan beras sejahtera.
2.	Megayana Masta, Judul skripsi” Implementasi Distribusi Beras sejahtera (RASTRA) Kota Agung Timur Tanggamus”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan program pemerintah beras sejahtera sebagai bahan utama dalam kajian penelitiannya.	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Megayana ini adalah implementasi pendistribusian beras sejahtera yang sering terlambat karena medan yang sulit. Sementara penelitian ini pada

			kurangnya keefektifan dalam penyalurannya kepada masyarakat.
3.	Winria Pitapurwati, Judul skripsi “ Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Sumarorong Kabupaten Mamasa”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama mengkaji tentang ketepatan sasaran penyaluran program beras sejahtera kepada masyarakat.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Winria ini yaitu fokusnya lebih kepada pelaksanaan penyalurannya yang selalu mengalami keterlambatan oleh pemerintah setempat. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada ketidak efektifan sasaran program yang mana masyarakat

			yang dalam katagori mampu masih mendapatkan kan bantuan tersebut.
--	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan tentang Efektifitas

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana sdapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan yang dilakukan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartkan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam sebuah keefektifan terdapat pencapaian tujuan yang ingin dituju sesuai dengan harapan, pencapaian tujuan ini adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Fraike Rumandor, *efektifitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mastarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. 7

Oleh sebab itu efektifitas pelaksanaan program-program pemerintah harus dievaluasi agar program tersebut berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat tercapai. Karena program-program tersebut adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keterbelakangan, serta peningkatan kualitas kesehatan, selain diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan langsung (*direct policies*) yang dampaknya terbatas.<sup>39</sup>

Banyaknya penduduk miskin yang tersebar di berbagai pelosok daerah mengindikasikan perlunya sebuah bantuan program yang berbasis pada masyarakat miskin. Dengan adanya program beras sejahtera pemerintah berharap untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin dan sekaligus mengharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga dapat untuk meningkatkan atau membka akses pangan keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga melalui program non tunai.<sup>40</sup>

Dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh presiden RI, pada Rapat Kabinet Terbatas (Rastas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Bantuan sosial pangan dapat disalurkan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bansos

---

<sup>39</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: ALFABETA. 2015). 29.

<sup>40</sup>Ibid, 4.

Rastra, diberikan dalam bentuk beras sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan biaya/harga tebus. Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan pedoman umum Bansos Rastra, perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos Rastra sesuai pasal 41 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Negara.<sup>42</sup>

Program beras sejahtera yang dilakukan oleh pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya publik (alam, finansial dan manusia) demi kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Salah satu bentuk kebijakan publik yang penting di negara modern kebijakan sosial. Sejarah menyaksikan bahwa semakin maju dan

---

<sup>41</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera. (jakarta pusat). 2.

<sup>42</sup>Ibid, 2.

demokratis suatu negara, semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap pentingnya kebijakan sosial.

Permasalahan kebijakan publik di Indonesia bisa dikaji dari rendahnya komitmen dan keberpihakan para pengurus kebijakan dan penyelenggara negara. Di Indonesia masih banyak kebijakan publik yang memihak orang kaya (*pro-rich*), ketimbang memihak orang miskin (*pro-poor*). Padahal, sebagai sebuah perangkat *governance* yang penting, kebijakan publik seharusnya lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya. Selain karena jumlah orang miskin di Indonesia sangat besar, orang kaya memiliki sumberdaya untuk menolong dirinya sendiri. Mereka memiliki kemampuan yang lebih besar dan pilihan yang lebih luas ketimbang orang miskin. Tanpa ditolong negara, orang kaya mampu menolong dirinya sendiri dan bahkan membantu orang lain.<sup>43</sup>

Kemiskinan sendiri memiliki sembilan kriteria, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
2. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber

---

<sup>43</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & perlindungan Sosial di Indonesia menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bandung: ALFABETA. 2009). 33-38.

alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air)

5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum)
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
8. Ketiadaan jaminan masa depan ( karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat)
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.<sup>44</sup>

## 2. Kesejahteraan Pangan

Dalam undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional

<sup>44</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & perlindungan Sosial di Indonesia menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bandung: ALFABETA. 2009). 16

maupun daerah hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Didalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa negara dengan jumlah penduduk yang besar dan disisi lain memiliki sumberdaya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 pasal 1, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kesejahteraan pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kesejahteraan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Semua cakupan tersebut jika tidak tercapai maka akan mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, bahkan kematian.<sup>45</sup>

Indikator kesejahteraan pangan masyarakat ialah dapat mengkonsumsi daging, susu atau ayam setiap hari. Serta sanggup makan nasi sebanyak dua atau tiga kali sehari, dengan demikian apabila semua indikator tersebut dapat terpenuhi maka suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Akan tetapi jika semua indikator tersebut tidak dapat terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan pangan suatu masyarakat belum sejahtera.

---

<sup>45</sup>Listiono, *Kemandirian Dan Ketahanan Pangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri kelimuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*.<sup>46</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Karena penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang bisa diamati.<sup>47</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.<sup>48</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus, dimana peneliti mengeksplorasi kehidupan-nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam.<sup>49</sup> Peneliti menggunakan jenis ini dalam penelitian karena dalam metode deskriptif kualitatif menggambarkan atau merumuskan sebuah data yang didapat dari kata-kata

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>47</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

<sup>48</sup>Rusydi Sulaiman, Mohammad Holil, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat eIKAF 2007), 38.

<sup>49</sup>John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 135.

atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang dimaksud untuk memperoleh kesimpulan.

Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Peneliti bertindak sebagai pengamat, serta hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Penelitian ini terus menerus mengalami reformasi dan redaksi ketika informasi-informasi baru ditemukan.<sup>50</sup>

Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik dari bidang yang diteliti dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara langsung. Disebut penelitian kualitatif karena metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah atau natural setting dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.<sup>51</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan cara sengaja karena dengan dasar pertimbangan bahwa belum ada peneliti yang mengkaji permasalahan tentang Efektivitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Gunungmalang ini menjadi pilihan untuk diteliti karena di Desa ini terdapat ketidak efektifan penyaluran

---

<sup>50</sup>Jalaludin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),25-26.

<sup>51</sup>Ibid, 9.

program beras sejahtera, sehingga membuat peneliti tergerak hatinya untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab ketidaktepatan penyaluran tersebut, dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata penyebab terjadinya ketidaktepatan tersebut memang adanya data dari pemerintah pusat yang kurang efektif, karena datanya masih banyak yang mengarah pada keluarga yang termasuk dalam kategori mampu.

### C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>52</sup>

Penentuan subyek penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pemilihan subyek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena dalam menentukan subyek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut, karena mereka dipilih untuk mewakili populasi atau sampel tersebut.

Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya adalah:

1. Kepala Desa Gunungmalang
2. Sekretaris Desa Gunungmalang

---

<sup>52</sup>Ibid, 47.

3. Kasi Pelayanan Desa Gunungmalang
4. Kepala Dusun Desa Gunungmalang
5. Ketua RT
6. Ketua Rw
7. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Desa Gunungmalang

Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka peneliti mempunyai alasan untuk memilih informan mulai dari perangkat Desa Gunungmalang selaku pelaksana penyaluran distribusi beras sejahtera pada masyarakat yang mana para perangkat desa ini dapat memberikan informasi yang valid serta dapat memberikan data-data berupa dokumen, seperti jumlah penerima program bantuan beras sejahtera serta juga dapat memberikan pedoman penyaluran beras sejahtera. Dengan demikian dapat membantu peneliti untuk mempermudah dalam mengalisis penelitian yang dilakukan ini.

Disisi lain peneliti juga memilih masyarakat penerima bantuan program beras sejahtera sebagai informan pelengkap untuk memperoleh data yang diinginkan. Alasan peneliti memilih masyarakat penerima bantuan program beras sejahtera ini tidak lain hanyalah untuk memberikan tanggapan serta respon dari mereka mengenai pendistribusian yang dalam pelaksanaanya terdapat beberapa ketidak efektifan.

#### **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam

objek penelitian dapat dijelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pihak pemerintah Desa Gunungmalang dan masyarakat penerima bantuan program beras sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe. Peneliti memfokuskan objek penelitiannya pada pihak pemerintah Desa selaku pihak peneyelenggara distribusi beras sejahtera pada titik distribusi akhir, serta masyarakat yang berpendapatan selaku penerima bantuan beras sejahtera.

#### **E. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam jangka waktu satu bulan yang tertera pada surat ijin yang diterbitkan oleh pihak kampus IAIN Jember, akan tetapi pada pelaksanaan penelitiannya dilapangan peneliti oleh pihak pemerintah Desa Gunungmalang diberi kebebasan melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh data. Sehingga dengan demikian peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini dimulai dari tanggal 26 april 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan hal yang sangat substansi dalam penelitian, sedangkan maksud dari metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data, dengan demikian data yang diharapkan tingkat kevalidannya dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>53</sup>

Sementara Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Melalui observasi tersebut peneliti dapat belajar kenyataan perilaku manusia atau objek dalam suatu situasi maupun makna dari perilaku tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipan pasif. Observasi partisipan pasif digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum holistik atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi.<sup>54</sup>

Observasi ini menjadi alasan utama bagi peneliti untuk digunakan sebagai teknik pengumpulan data, karena dengan observasi ini peneliti dapat melihat serta mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang sedang diselidiki untuk suatu tujuan tertentu yaitu berupa penelitian ini.

---

<sup>53</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), 69.

<sup>54</sup>Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 145

dalam penelitian ini penulis terjun langsung kelokasi serta mencatat apa yang diperolehnya di lapangan.

Dengan melakukan pengamatan secara langsung ini, maka penulis dapat menyelidiki secara langsung praktek distribusi program beras sejahtera yang kurang tepat sasaran tersebut, karena hal itu terjadi memang adanya datanya dari pemerintah pusat yang kurang tepat dan tidak cepat diperbarui data-data yang mengarah pada penerima bantuan yang masuk dalam kategori mampu.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.<sup>55</sup>Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Dalam penelitian teknik ini wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak tersruktur. Dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besarnya saja dalam suatu permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), 74.

<sup>56</sup>Ibid, 137-140.

Penulis menggunakan metode ini dalam penelitiannya karena ingin mendapatkan data-data atau informasi yang valid dan secara langsung dari informan-informan yang akan menjadi sumber data yang akan diperoleh dari penelitian tersebut.

Wawancara ini menjadi pilihan penulis dalam melakukan penelitian, karena dengan wawancara ini penulis dapat memperoleh data yang diinginkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dimana dalam wawancara ini yang menjadi sasaran bagi penulis adalah perangkat Desa Gunungmalang selaku pelaksana pendistribusian beras sejahtera dititik akhir pada masyarakat serta juga masyarakat penerima bantuan program beras sejahtera.

### c. Dokumentasi

Metode ini merupakan sekumpulan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>57</sup> Dokumentasi juga dapat berupa buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen, film atau foto. Dokumentasi dapat dipergunakan sebagai bukti untuk pengujian. Seorang peneliti dapat menguji apakah data yang diperoleh benar atau salah dengan cara melihat kembali dokumentasi yang digunakan.<sup>58</sup> Karena hasil dari penelitian

---

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. (Jakarta: PT rineka Cipta, 2010). 201.

<sup>58</sup>Djamal, *Paradigma Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015). 67.

observasi ini akan menjadi kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni.

Metode dokumentasi menjadi salah satu pilihan alasan penulis dalam melakukan penelitian ini, karena dengan dokumentasi tertulis sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya. Dan yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah data tentang profil Desa Gunungmalang, serta juga data-data tentang jumlah penerima bantuan program bersa sejahtera. Selain itu yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa foto-foto peneliti dalam memperoleh data.

### **G. Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data menurut merriam menyatakan bahwa dua tahap perlu dilakukan oleh peneliti ketika menganalisis data, yaitu sewaktu pengambilan data dan setelah pengambilan data. Proses penganalisan bertujuan untuk membantu peneliti memudahkan tumpukan data yang diperoleh.<sup>59</sup> Pada penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Miles *and* Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sampai jenuh.<sup>60</sup> Analisis data terdiri

---

<sup>59</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012). 141.

<sup>60</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 246.

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data melalui beberapa tahapan seperti yang telah disebutkan diatas yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, mengumpulkan data serta memilihnya sesuai dengan fokus tema penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yakni memaparkan secara menyeluruh guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Menyimpulkan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi data serta melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna sebagai pengambilan kesimpulan yang tepat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Ibid, 245-246.

## H. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai caradan berbagai waktu. Penelitian menggunakan triangulasi sumber, menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>62</sup>

Triangulasi sumber ialah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti akan melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk kemudian dialisis lebih lanjut, sehingga proses keabsahan data dilakukan dengan melalui deskripsi, mengkategorikan hingga meminta kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut untuk mendapatkan kesimpulannya.

## I. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian sedang berjalan. Dan bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.<sup>63</sup> Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan proses penelitian, yaitu:

- a. Tahap pra lapangan

---

<sup>62</sup>Ibid, 274.

<sup>63</sup>Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84

1. Menyusun rancangan penelitian, yang diantaranya: menentukan judul penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
  2. Menentukan lapangan penelitian
  3. Menurus surat perizinan
  4. Memilih informan
  5. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- b. Tahap pelaksanaan dilapangan
1. Memahami latar belakang penelitian
  2. Memasuki atau turun langsung ke lapangan penelitian
  3. Mengumpulkan data
  4. Menyempurnakan data yang belum lengkap
- c. Tahap pasca penelitian
1. Menganalisis data yang diperoleh
  2. Mengurus perizinan selesai penelitian
  3. Menyajikan data dalam bentuk laporan
  4. Menyempurnakan laporan dengan merevisi data

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Gunungmalang

Nama Desa Gunungmalang berasal dari letak Desa yang berada tepat di kaki Gunung Raung yang posisinya melintang atau *malang* (bhs. madura) sehingga disebut DESA GUNUNGMALANG. Secara umum Desa Gunungmalang terletak pada posisi yang kurang strategis, yaitu berada diluar jalur Zona ekonomi, berjarak 35 Km kearah timur dari ibu kota Kabupaten Jember. Desa Gunungmalang merupakan salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan merupakan Desa yang sebagian besar berlahan Kering.

Desa Gunungmalang merupakan daerah pertanian sehingga mayoritas masyarakatnya merupakan petani, sumberdaya yang ada saat ini dan menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi: padi, tembakau, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Disamping itu Desa Gunungmalang sebagai penghasil kopi, bambu, dan kayu sengaon Laut.<sup>64</sup> Desa Gunungmalang memiliki 5 (lima)

Dusun, yaitu:

---

<sup>64</sup>Dokumentasi, Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe, april 2018

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Karang Kebun
- 3) Dusun Ajung Babi
- 4) Dusun Gayasan
- 5) Dusun Paleran

## 2. Karakteristik Wilayah

Desa Gunungmalang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sumberjambe yang secara umum mempunyai karakteristik wilayah Desa Gunungmalang ini dapat kita lihat dari aspek fisik yang diantaranya letak, luas, dan topografi.

### a. Letak

Desa Gunungmalang merupakan desa yang berjarak 35 Km kearah timur dari ibu kota Kabupaten Jember. Desa Gunungmalang merupakan salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan merupakan Desa yang sebagian besar berlahan kering dan secara administrative batas-batas Desa Gunungmalang adalah sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Desa Rowosari Kec. Sumberjambe
- 2) Batas Selatan : Desa Slating Kec. Ledokombo
- 3) Batas Barat : Desa Cumedak Kec. Sumberjambe
- 4) Batas Timur : Hutan Gunung Raung

Desa Gunungmalang terdiri dari 5 dusun dengan 12 RW (Rukun Warga) dan 71 RT (Rukun Tetangga) yang diperinci sebagai berikut:

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Karang Kebun
- 3) Dusun Gayasan
- 4) Dusun Paleran
- 5) Dusun Ajungbabi

**b. Luas**

Luas wilayah Desa Gunungmalang adalah  $\pm 1.000,48700$  Ha/Km. Yang menurut jenis penggunaan lahan tanahnya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Luas Tanah Menurut Penggunaan**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Lahan Sawah	252,000 Ha
2.	Lahan Ladang	259,000 Ha
3.	Lahan Perkebunan	374, 846 Ha
4.	Hutan	-
5.	Lainnya	-

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2017

Sebagian besar Desa Gunungmalang berlahan kering dan merupakan daerah pertanian sehingga mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Sumberdaya yang ada saat ini dan menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : padi, jagung, Tembakau, dan tanaman palawija lainnya, berikut beberapa jenis komoditas pertanian Desa Gunungmalang dengan hasil pertahunnya:

**Tabel 4.2**

**Komoditas Pertanian di Desa Gunungmalang Tahun 2014**

No	Komoditas	Panen/Ton per tahun
1.	Padi	435
2.	Jagung	20
3.	Kedelai	-
4.	Tembakau	-

Sumber Data: Profil Desa Gunungmalang Tahun 2014

**c. Topografi**

Secara topografi Desa Gunungmalang terletak diantara:

- Garis Bujur (BT) = 113,89885
- Garis Lintang (LS) = 08,06595
- Luas Desa (Ha) = 1.000,48700 Ha
- Tinggi DPL (M) = 446-625 mdpl

Desa Gunungmalang berjarak 35 Km kearah timur dari ibu kota Kabupaten, dan Kondisi Geografis Desa Gunungmalang berbukit-bukit dengan beberapa Gugusan dataran tinggi yang mengelilinginya.

### 3. Karakteristik Penduduk

Data jumlah penduduk atau demografi Desa Gunungmalang dapat kita dari beberapa golongan, baik dari segi usia maupun jenis kelamin serta juga dapat kita lihat dari segi pendidikan maupun mata pencahariannya. Jumlah penduduk Desa Gunungmalang pada Tahun 2018 ini berjumlah sebanyak 7.537 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.743 jiwa dan perempuan 3.794 jiwa.<sup>65</sup>

#### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Berikut data-data penduduk Desa Gunungmalang berdasarkan usia dan dapat kita lihat laju pertumbuhan penduduk pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Data Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**

No	Golongan Umur	Jumlah Jiwa
1.	<1 Tahun	88
2.	1-4 Tahun	297
3.	5-14 Tahun	966
4.	15-39 Tahun	3.395

<sup>65</sup> Dokumentasi, Desa Gunungmalang. Mei 2018.

5.	40-64 Tahun	1. 946
6.	65 Keatas	845
		7.537

Sumber Data: Profil Desa Gunungmalang Tahun 2017

#### b. Jumlah Penduduk Miskin

Sebagai desa yang berada di daerah pelosok dengan jumlah penduduk sebanyak 7.537 jiwa yang terdiri dari 2.841 KK yang mayoritas tingkat pendidikannya tamatan SD, hal ini yang mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk miskin yang berjumlah 1.579 orang dan ditambah lagi dengan jumlah pengangguran sebanyak 125 orang.<sup>66</sup>

#### c. Penduduk Menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan

**Tabel 4.4**

**Data Penduduk Menurut Pekerjaan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Pertanian	5.063
2.	Buruh Tani	736
3.	Buruh Pabrik	16
4.	PNS	9
5.	Karyawan Swasta	5
6.	Wiraswasta/Perdagangan	85

Sumber Data: Profil Desa Gunungmalang Tahun 2017

<sup>66</sup>Dokumentasi, Desa Gunungmalang Mei 2018.

#### 4. Potensi Daerah

Desa Gunungmalang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumberdaya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan diantaranya:

- 1) Lahan Sawah : 252,000 Ha
- 2) Lahan Ladang : 259,000 Ha
- 3) Lahan Perkebunan : 374,846 Ha
- 4) Sumber Mata Air : 24 Titik

#### 5. Sarana dan Prasarana

##### a. Prasarana Umum

- 1) Jalan Aspal : 13 Km
- 2) Jembatan : 17 Unit
- 3) Irigasi : 1 Paket
- 4) Pasar Desa : 1

##### b. Prasarana Pendidikan

- 1) Gedung Paud : 2 Lembaga
- 2) Gedung TK : 3 Lembaga
- 3) Gedung SD/MI : 5 Lembaga
- 4) Gedung SMP : 1 Lembaga
- 5) TPA : 3 Lembaga

**c. Prasarana Kesehatan**

- 1) Polindes : 1 Unit
- 2) Posyandu : 3 Unit
- 3) MCK : 1 Unit

**d. Sarana Ibadah**

- 1) Masjid : 17 Unit
- 2) Musholla : 55 Unit

**e. Sarana Olah Raga**

- 1) Lapangan Sepak Bola : 1 Buah

**6. Kondisi Sebelum UU Desa Tahun 2015**

- 1) Kondisisosialkemasyarakatan Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe
- 2) Problem sosialdankelembagaan kemasyarakatan desa

Secara geografis Desa Gunungmalang adalah desa yang memiliki cukup luas kawasan pertanian akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan prasarana yang memadai sehingga akses keberapa lahan pertanian membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam pengelolaan pertanian dan hasil yang didapkatannyapun tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk mengelola lahannya. Yang menjadi masalah diantaranya adalah akses jalan dan perairan kelahan petani. Hal ini menuntut sebagian banyak masyarakat khususnya para pemuda mencari pekerjaan di kota lain. Akibat dari banyaknya warga yang keluar berefek pada sedikitnya SDM yang mampu mengerjakan

lembaga kemasyarakatan di Desa sehingga dampak dari itu semua adalah peran dan fungsi kelembagaan masyarakat menjadi pasif. Masyarakat apatis dan kurang peduli terhadap kemajuan perkembangan pembangunan yang ada di Desa Gunungmalang.

#### **7. Kondisi Setelah Pelaksanaan UU Desa Tahun 2015**

- 1) Kondisi sosial kemasyarakatan Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe:
- 2) Perubahan sosial dan kelembagaan kemasyarakatan desa

Desa Gunungmalang adalah desa memiliki cukup luas kawasan pertanian dengan adanya UU Desa yang baru Desa Gunungmalang mendapatkan stimulan untuk memperbaiki prasarana yang memadai khususnya dibidang pertanian dan Jalan Lingkungan. Hal ini direalisasikan dengan memulai membangun akses jalan usaha tani, ini semua dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan hasil tani sehingga mampu menekan biaya pengelolaan hasil pertanian. Masyarakat mulai aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan yang ada di Desa.

#### **8. SUMBER DAYA KELEMBAGAAN / ORGANISASI**

BPD	: 1 Lembaga
LPKMD	: 1 Lembaga
PKK	: 1 Lembaga
Karang Taruna	: 1 Lembaga

Kelompok Tani : 9 Kelmpok  
 Gapoktan : 1 Kelompok  
 RT : 71  
 RW : 12

### 9. Riwayat Kepala Desa Gunungmalang

No	Nama Kepala Desa	Masa Bakti	Keterangan
1.	KACUNG	1893-1903	DEFENITIF
2.	HELLEH	1903-1918	DEFENITIF
3.	SOETOPRODJO (P. SEPAHI)	1918-1942	DEFENITIF
4.	SINGOREDJO (SLAMO)	1942-1980	DEFENITIF
5.	SOEJTIPTO	1980-1984	PJ KADES
6.	SARIDJO	1984-1996	DEFENITIF
7.	SUJONO	1996-2002	DEFENITIF
8.	MASNIJO	2002-2007	PJ KADES
9.	BUDIHARYONO	2007-2013	DEFENITIF
10.	ERNA DWI SETIARINI	2013-2019	DEFENITIF

Sumber: Profil Desa Gunungmalang 2017.

### B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil dari pedoman penyusunan skripsi IAIN Jember, karena hal yang penting setelah membahas latar belakang adalah membahas penyajian data serta analisisnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Efektifitas Sistem Distribusi Program Beras Sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe**

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian atau pemerintah desa selaku penyelenggara pendistribusian program RASTRA di Desa Gunungmalang, maka disajikan data-data tentang bagaimana efektivitas sistem distribusi program beras sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe, berikut beberapa ketidak efektifan sistem pendistribusian program RASTRA yang diantaranya:

#### **a. Keterlambatan Distribusi/Tidak Tepat Waktu**

Ketidak efektifan sistem pendistribusian program beras sejahtera (RASTRA) di Desa Gunungmalang ini diakibatkan dari pemerintah pusat atau perum bulog selaku pihak penyelenggara pendistribusian yang setiap bulannya terkadang mengalami keterlambatan.

Dalam pendistribusian beras sejahtera (RASTRA) di Desa Gunungmalang ini setiap bulannya tidaklah begitu lancar atau setiap

bulan didistribusikan, karena terkadang dalam satu bulan tidak didistribusikan melainkan akan didistribusikan pada bulan berikutnya, hal ini karena memang dari pihak bulog sendiri selaku pihak penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat terkadang memang mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pendistribusian pada titik distribusi atau pemerintah Desa, seperti penuturan yang diungkapkan oleh bapak Imam Sutaji selaku Sekretaris Desa Gunungmalang:

“Pendistribusian beras sejahtera ini tidaklah selalu lancar setiap bulan didistribusikan, karena terkadang dalam satu bulan itu tidak ada pendistribusian samasekali, tapi biasanya itu akan didistribusikan pada bulan berikutnya, kalau sudah seperti ini biasanya terkadang satu bulan itu ada dua kali distribusi rastra ini.”<sup>67</sup>

Penuturan dari bapak Imam Sutaji ini menunjukkan bahwa pendistribusian beras sejahtera memang tidaklah selalu lancar didistribusikan setiap bulan. Karena kadang-kadang juga mengalami keterlambatan distribusi dari perum bulog ke titik distribusi akhir yaitu pemerintah desa selaku sebagai pihak penyelenggara distribusi akhir kepada penerima bantuan program beras sejahtera tersebut. Pernyataan tersebut di atas juga disampaikan oleh bapak Khoiri selaku Kasi Pelayanan/Kesra Desa Gunungmalang yang mengatakan sebagai berikut:

“Dalam setiap bulannya distribusi rastra tidaklah mesti didistribusikan oleh pemerintah pusat, karena terkadang memang ada keterlambatan, tapi dalam keterlambatan itu

<sup>67</sup>Imam Sutaji, Wawancara, Gunungmalang, 26 April 2018.

biasanya akan didistribusikan pada bulan berikutnya, jadi masyarakat bisa mendapatkan jatah distribusi sebulan dua kali, biasanya seperti itu kalau ada keterlambatan distribusi di bulan sebelumnya”.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendistribusian beras sejahtera tidaklah selalu setiap bulan, karena terkadang mengalami keterlambatan distribusi.

Disisi lain Ibu Kepala Desa Gunungmalang juga mengatakan bahwa:

“Memang benar dengan adanya keterlambatan atau kurang tepatnya waktu pendistribusian beras sejahtera itu, tapi tidak sering cuma kadang-kadang saja.”<sup>69</sup>

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kevalidan data terkait adanya keterlambatan distribusi program beras sejahtera memang benar-benar terkadang terjadi di Desa Gunungmalang. Sementara dalam pelaksanaan pendistribusiannya selalu dalam pengawasan babinsa Desa Gunungmalang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Khoiri bahwa:

“Setiap pendistribusian beras sejahtera ini dipantau langsung oleh babinsa desa gunungmalang, kami selaku petugas di desa melakukan laporan secara online yang kemudian kami kirim ke TKSK Kecamatan, karena memang sudah memakai sistem online.”<sup>70</sup>

<sup>68</sup>Khoiri, Wawancara, Gunungmalang, 9 Mei 2018.

<sup>69</sup>Erna Dwi Sriarini, Wawancara, Gunungmalang, 27 April 2018.

<sup>70</sup>Khoiri, Wawancara, Gunungmalang, 6 September 2018.

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi peneliti bahwa pada hari Selasa bulan Juni saat pendistribusian beras sejahtera ini dipantau langsung oleh bapak Asep selaku babinsa Desa Gunungmalang untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan serta tidak adanya penyelewengan wewenang. Kemudian para petugas penyelenggara Desa Gunungmalang melakukan laporan secara online yang kemudian dilaporkan kepada TKSK, karena sistemnya sudah memakai online.<sup>71</sup>

#### **b. Kurang Tepat Sasaran (Objek Penerima)**

Pada pelaksanaan pendistribusian beras sejahtera (RASTRA) di Desa Gunungmalang ini masih terbilang kurang efektif, sebab sampai saat ini (2018) data penerima bantuan program beras sejahtera ini masih tetap data yang tahun 2011, sebab data yang dari pusat masyarakat yang tergolong mampu dapat bantuan program beras sejahtera. Pemerintah Desa Gunungmalang telah mengajukan data penerima yang baru, akan tetapi tidak sesuai harapan sebab data tersebut sampai saat belum juga turun dari pusat, sebagaimana yang telah diungkapkan langsung oleh Ibu Erna Dwi Stiarini selaku Kepala Desa Gunungmalang yaitu:

“Data penerima bantuan beras sejahtera ini masih tetap data yang dari tahun 2011 yang lalu, data yang dari kepala desa yang sebelumnya, sejak saya menjabat jadi kades dari tahun 2013 saya sudah mengajukan data penerima baru yang benar-benar valid yang sesuai dengan kriteria masyarakat penerima bantuan tersebut, akan tetapi sampai

---

<sup>71</sup>Observasi, Gunungmalang, 25 Juni 2018.

saat ini data yang saya ajukan itu belum turun dari pemerintah pusat, padahal ditahun 2018 ini program beras sejahtera harus tepat sasaran. Dan apabila dalam satu rumah ada dua kepala keluarga yang sama-sama mendapat bantuan beras sejahtera ini, maka di tahun 2018 ini dipecah atau hanya dapat satu bantuan saja dan satu bantuan lainnya diberikan pada keluarga lain yang tidak mampu dan serta layak menerima bantuan program beras sejahtera tersebut.<sup>72</sup>

Dari pernyataan Ibu Kepala Desa Gunungmalang di atas ini dapat kita ketahui bahwa data penerima bantuan beras sejahtera ini kurang valid, karena memang dari pemerintah pusat sendiri yang dalam memberikan data penerima bantuan yang kurang sesuai dengan kriteria masyarakat penerima bantuan program beras sejahtera. Karena dari data jumlah penduduk laki-laki 3.743 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.794 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.841 dengan jumlah masyarakat penerima bantuan Program Beras Sejahtera sebanyak 11.86 Kepala Keluarga (KK). Dari sekian banyak penerima bantuan program beras sejahtera ini datanya tetap yang ditahun 2011 lalu, hingga saat ini belum ada data baru yang valid dari pemerintah.<sup>73</sup>

Disisi lain Khoiri juga mengatakan bahwa:

“Apabila ingin pendistribusian beras sejahtera ini tepat sasaran maka satu-satunya langkah yang dapat dilakukan adalah BPS harus terjun langsung mengecek atau mendata masyarakat yang benar-benar kurang mampu/miskin dengan yang benar-benar mampu secara perkonomiannya, maka dengan demikian saya yakin

<sup>72</sup>Erna Dwi Sriarini, Wawancara, Gunungmalang, 27 April 2018.

<sup>73</sup>Dokumentasi, Desa Gunungmalang. Mei 2018.

pasti tidak akan salah sasaran lagi, tapi kan dalam hal ini tidak ada pihak BPS yang mau turun langsung”.<sup>74</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Nurul selaku perangkat

Desa Gunungmalang mengatakan bahwa:

“Ketidaktepatan penerima bantuan beras sejahtera ini karena memang data yang turun dari pemerintah pusat sudah seperti itu, jadi kami di desa hanya menjalankan data yang sudah ada.”<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Sutaji selaku sekretaris Desa gunungmalang mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah tepat sasaran dan ada pula yang kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan data yang turun dari pemerintah memang begitu adanya. Dan berikut beberapa kriteria masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan program beras sejahtera (RASTRA),<sup>76</sup>

yaitu:

- a. Dinding rumah memakai anyaman bambu atau gedek.
- b. Jenis lantai rumah terbuat dari tanah atau plesteran biasa.
- c. Tidak memiliki rumah sendiri atau hanya rumah warisan dari orang tuanya.
- d. Tidak memiliki lahan pertanian seperti sawah atau kebun.
- e. Hanya berprofesi sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

---

<sup>74</sup>Khoiri, Wawancara, Gunungmalang, 9 Mei 2018.

<sup>75</sup>Nurul, Wawancara, Gunungmalang, 8 Mei 2018.

<sup>76</sup>Imam Sutaji, Wawancara, Gunungmalang, 26 April 2018.

- f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan tungku atau kayu bakar.
- g. Tidak mampu membayar biaya berobat ke dokter, bidan, puskesmas.
- h. Jarang sekali mengkonsumsi daging dalam kehidupan sehari-harinya.

Dari hasil wawancara di tersebut dapat kita ketahui bahwa ketidaktepatan distribusi beras sejahtera ini tidaklah selalu salah sasaran, karena pada kenyataannya ada beberapa penerima yang sesuai dengan kriterianya dan masih banyak juga yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan data yang turun dari pemerintah masih banyak data yang mengarah pada masyarakat yang secara perekonomiannya masih tergolong mampu.

Masyarakat yang kurang mampu di Desa Gunungmalang masih banyak dijumpai yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan beras sejahtera tersebut. karena dalam kegiatan memasak sehari-harinya masih memakai tungku dan berdinding gedek. sebagaimana yang disampaikan oleh Hasyim selaku ketua RT 003 mengatakan bahwa:

“masyarakat disini kan masih banyak yang memakai dinding gedek dan lantai plesteran biasa, dan rata-rata semua rumah punya tungku, karena kita hidup di pelosok kan sampean tahu sendiri disini masyarakat memasak pakai tungku.”<sup>77</sup>

<sup>77</sup>Hasyim, Wawancara, Gunungmalang, 03 September 2018.

Hal senada juga disampaikan oleh basri selaku ketua RW 009 mengatakan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat yang menerima bantuan disini rata-rata ya memakai tungku dan berinding gedek dan lantai plesteran biasa.”<sup>78</sup>

### c. Kebijakan Pengelola Rastra yang Tidak Sesuai Dengan Data

Pemerintah Desa Gunungmalang selaku pihak penyelenggara titik distribusi program beras sejahtera pada masyarakat, maka pemerintah Desa Gunungmalang berinisiatif untuk membuat kebijakan sendiri dimana masyarakat penerima bantuan beras sejahtera yang sudah meninggal dunia atau orangnya berada diperantauan maka beras bantuannya diberikan kepada orang lain dengan sistem bergantian diberikan pada masyarakat yang tidak ada data penerimanya, yaitu dengan cara meroling penerimarastra dengan cara didistribusikan secara bergantian pada masyarakat yang kurang mampu serta layak menerimanya, dan hal ini dilakukan demi keseimbangan serta keamanan di masyarakat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Khoiri selaku Kasi Pelayanan, yaitu:

“Banyak masyarakat yang datang menemui pemerintah desa, mereka tetap meminta agar program beras sejahtera ini disamaratakan, karena banyak diantara mereka yang sebenarnya mampu tapi tetap minta bagian, bahkan ada juga yang sudah menjadi haji mas, tapi masih tetap minta bantuan, dan tak jarang mereka yang mampu itu masih mendatangi perangkat desa atau kasun minta agar dapat bagian juga. dan banyak pula yang memang kurang mampu tapi tidak dapat karena di data bastnya tidak ada, akhirnya kami selaku pemerintah desa membuat solusi dimana

<sup>78</sup>Basri, Wawancara, Gunungmalang, 03 September 2018.

masyarakat penerima yang sudah meninggal dunia atau orangnya berada diperantauan maka beras bantuannya kita berikan pada masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya, artinya yang dapat bulan ini maka bulan berikutnya tidak dapat karena dipindahkan pada orang lain yang juga berhak mendapatkannya, hal ini kami lakukan untuk menjaga keseimbangan dan keamanan dimasyarakat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Dan menurut info di tahun 2019 mendatang ini bantuan beras sejahtera akan direalisasikan melalui voucher agar lebih tepat sasaran”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara dengan kasi pelayanan ini diketahui bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu serta layak menerima bantuan program beras sejahtera ini yang namanya tidak tercantum didata dari pusat. Hal dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya bantuan program beras sejahtera ini tidaklah sepenuhnya dapat mensejahterakan pangan bagi masyarakat kurang mampu, melainkan hanya dapat mengurangi beban pengeluaran mereka. Karena pada hakikatnya bantuan ini hanya bisa membantu mengurangi beban kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat bantuan program. Hal senada juga disampaikan oleh Erna Dwi Setiarini bahwa:

“Sebenarnya saya telah mengajukan data penerima baru program beras sejahtera yang benar-benar tepat sasaran yaitu masyarakat yang benar-benar kurang mampu menurut saya, sejak saya menjabat dari 2013 yang lalu telah saya data dan saya ajukan pada pemerintah, tapi sampai saat ini data tersebut belum keluar, data penerima bantuan program beras sejahtera itu yang sampai saat ini itu adalah data yang tahun 2011, makanya kami selaku pihak penyelenggara di Desa kamu membuat kebijakan sendiri yaitu dengan

---

<sup>79</sup>Khoiri, Wawancara, Gunungmalang, 6 September 2018.

diberlakukannya sistem penerima bergantian dengan tujuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat”.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kepala Desa ini dapat kita ketahui bahwa telah diajukan data yang benar-benar tepat sasaran, akan tetapi sampai saat ini dari pihak pemerintah data tersebut belum keluar, akibatnya penerima bantuan program beras sejahtera ini banyak yang dalam kategori sudah mampu tapi masih tercantum namanya sebagai penerima bantuan karena datanya tetap yang dari tahun 2011 yang lalu.

#### **d. Pemahaman Sosialisasi Program Rastra yang Kurang Tepat**

Sosialisasi program beras sejahtera (Rastra) yang diberlakukan sistem bergantian bagi penerimanya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungmalang kepada masyarakat, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Akan tetapi dalam mensosialisasikan program ini tidaklah semua masyarakat memahaminya dikarenakan banyaknya masyarakat yang sudah berumur dan minimnya pendidikan mereka, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Erna Dwi setiarini beliau mengatakan bahwa:

“Setiap kali mau didistribusikan beras sejahtera ini kami selaku pemerintah desa dan juga semua kasun dan rt sudah mensosialisasikan bahwa akan diberlakukan sistem penerimaan secara bergantian agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, akan tetapi banyak masyarakat yang kurang paham atau bagaimana sehingga banyak diantara mereka yang protes pada rt-rt setempat, mereka

---

<sup>80</sup>Erna Dwi S, Wawancara, Gunungmalang, 27 April 2018.

beranggapan bahwa yang dapat itu dipilih-pilih, padahal tidak, hanya saja sistemnya dibuat begitu”.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang terhadap pemahaman dari sosialisasi program beras sejahtera dengan diberlakukannya sistem penerimaan bergantian. Hal ini karena minimnya pengetahuan masyarakat sehingga membuat mereka terkadang atau sering meminta jatah bantuan Rastra, yang tidak sesuai dengan aturan.

Karena pengetahuan merupakan kunci utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu program yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tingkat pendidikannya rendah, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami suatu hal apapun. Seperti yang diungkapkan oleh Erna Dwi setiarini bahwa:

“Kebanyakan masyarakat kita ini kan pendidikannya rendah yaitu hanya tamatan SD bahkan banyak tak tidak sampai tamat, jadi ketika ada kita memberi pemahan terkait program mereka itu banyak yang kurang paham. ada banyak sekali masyarakat kita yang dalam kategori mampu tapi daftar namanya dari pemerintah tercantum sebagai penerima bantuan beras sejahtera, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau memberikan haknya kepada orang lain yang tidak mampu, maka kami juga tidak memaksa untuk mencabut hak bantuannya dan akhirnya kami berikan bantuan tersebut, karena apabila tidak kami berikan mereka biasanya datang pada kasun setempat atau ke kantor desa untuk menyanyakan perihal bantuan rastra ini”.<sup>82</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Khoiri bahwa:

---

<sup>81</sup>Erna Dwi Setiarini, Wawancara, Gunungmalang, 27 April 2018.

<sup>82</sup>Erna Dwi Setiarini, wawancara, Gunungmalang, 27 April 2018.

“Yang banyak tidak paham ketika kita menyampaikan sosialisasi program sistem penerima bergantian ini adalah mereka yang usianya sekitar 40-an keatas, karena kebanyakan dari mereka ini kan pendidikannya sangat rendah”.<sup>83</sup>

Dalam beberapa kali dilakukan wawancara dengan perangkat desa ini dapat diketahui bahwa rendahnya pendidikan masyarakat yang juga menjadi hambatan dalam memahami sosialisasi dari pemerintah desa. Disisi lain Hasyim juga mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini kan memang rata-rata tamatan SD bahkan banyak orang-orang tua yang tidak sekolah, jadi banyak yang tidak paham.”<sup>84</sup>

Dari beberapa hasil wawancara dengan para perangkat desa dapat diketahui bahwa masih banyaknya masyarakat yang sudah mampu secara perekonomiannya, akan tetapi masih banyak diantara mereka yang meminta bantuan Rastra, bahkan ada diantara mereka yang sampai mendatangi perangkat desa baik itu ke balai desa ataupun datang langsung kerumahnya.

## **2. Respon Masyarakat Terhadap Sasaran Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunungmalang.**

Program beras sejahtera merupakan program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga yang berpendapatan rendah dalam mencukupi kebutuhan pangan serta dapat mengurangi beban

<sup>83</sup>Khoiri, Wawancara, Gunungmalang, 14 Mei 2018.

<sup>84</sup>Hasyim, Wawancara, Gunungmalang, 03 September 2018.

finansialnya melalui distribusi beras sejahtera. Selain itu tujuan dari program beras sejahtera ini untuk memberikan bantuan pangan terdapa masyarakat yang berpendapatan rendah atau kurang mampu dalam rangka untuk memenuhi katahanan pangan.

Pada kenyataannya di lapangan masih banyak kita jumpai masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori kurang mampu (mampu secara ekonominya) masih banyak juga yang mendapatkan bantuan program tersebut. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap sasaran penerimaan program beras sejahtera (RASTRA) dimana dalam sistem distribusinya yang masih kurang tepat sasaran.

**a. Persepsi Masyarakat Terhadap Kurang Tepatnya Sasaran Penerima Rastra**

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa program beras sejahtera ini diperuntukkan kepada keluarga yang berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan masih banyak ketidaktepatan penerima bantuan program beras sejahtera. Salah satu indikator kemiskinan menurut BPS yaitu adalah hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu serta hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, dengan kata lain salah satu indikator kemiskinan menurut BPS adalah kekurangan pangan. untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah Indonesia

mencanangkan salah satu program yaitu beras sejahtera.<sup>85</sup> Apabila dengan adanya bantuan tersebut masyarakat masih tetap dalam standart indikator kemiskinan tersebut, maka tingkat kesejahteraan pangan masyarakat berpendapatan rendah masih kurang sejahtera. Sebab program beras sejahtera ini dalam proses pendistribusiannya masih kurang tepat sasaran. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan, yaitu Ibu Iseh di Dusun Gayasan:

“Kalau dulu selalu dapat raskin, tapi sekarang sudah jarang dapat karena kebanyakan orang yang punya sawah yang dapat bantuan beras itu, malah yang kurang mampusekarang jarang dapat, dan terkadang berasnya kurang bagus berbau dan potong-potong, walaupun dapat bantuan itu ya hanya sekedar dapat mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja ”.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa, dengan dapatnya bantuan program beras sejahtera ini bukan berarti masyarakat menjadi sejahtera atau dapat tercukupi kebutuhannya, artinya masyarakat masih berada dalam indikator kurang sejahtera karena jarang dapat bantuan tersebut. dan sekalipun dapat bantuan hanya dapat mengurangi beban pengeluaran kebutuhan hidupnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Natun bahwa:

“Dalam keluarga saya kan ada dua kepala rumah tangga satu rumah, kalau dulu sama-sama dapat, tapi sekarang cuma dapat satu bantuan keluarga saja, padahal saya sangat

<sup>85</sup>Megayana Masta, *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (Raskin) Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus*. 1.

<sup>86</sup>Iseh, Wawancara, Gunungmalang, 20 Juni 2018.

mengharap selalu dapat bantuan beras itu, karena dengan bantuan beras itu bisa sedikit membantu memenuhi kebutuhan dalam beberapa hari”.<sup>87</sup>

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi peneliti bahwa memang pada hari selasa akhir bulan juni penerima bantuan program beras sejahtera memang mendapat bantuan satu kepala keluarga, padahal dalam satu rumah ada dua kepala keluarga yang sebelumnya sama-sama mendapatkan bantuan program beras sejahtera.<sup>88</sup>

Disisi lain juga disampaikan oleh Ibu Burasi bahwa:

“ Saya kan kalau dulu itu setiap bulan dapat bantuan beras itu, tapi sekarang ini sudah beberapa kali tidak pernah dapat, bahkan sampai saya tanyakan pada pak rt, katanya saya akan dapat dilain waktu, bahkan saya sampai mengumpulkan kartu keluarga (KK) pada pak rt tapi sampai sekarang belum dapat”.<sup>89</sup>

Dalam wawancara dengan informan yang lain juga disampaikan hal tak jauh berbeda, yaitu pada intinya dengan adanya bantuan tersebut tidaklah mencukupi kebutuhan pangan, melainkan hanya sekedar dapat membantu mengurangi pengeluaran kebutuhan pokok. Disisi lain dimana Ibu Yusda juga mengatakan bahwa:

“Kan kalau biasanya saya dapat terus bantuan beras itu, tapi bulan kemarin dan sekarang ini sudah tidak dapat lagi, dan setelah saya tanyakan pada pak rt katanya saya akan dapat dipembagian selanjutnya karena sekarang katanya yang dapat beras itu harus gantian, karena dengan bantuan itu kan sedikit bisa membantu kebutuhan”.<sup>90</sup>

<sup>87</sup>Natun, Wawancara, Gunungmalang, 21 Juni 2018.

<sup>88</sup>Observasi, Gunungmalang, 25 Juni 2018.

<sup>89</sup>Burasi, Wawancara, Gunungmalang, 25 Juni 2018.

<sup>90</sup>Yusda, Wawancara, Gunungmalang, 27 Juni 2018.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketahanan pangan masyarakat masih kurang sejahtera, sebab salah satu indikator kemiskinan hanya dapat mengkonsumsi daging satu kali seminggu dan dapat makan sehari satu kali atau dua kali. Jika kita lihat dari hasil wawancara di atas, masyarakat yang berpendapatan rendah banyak yang berharap dan selalu dapat bantuan, tapi pada kenyataannya banyak diantara mereka yang jarang dapat serta juga adanya keterlambatan pendistribusian. Maka dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan dapatnya bantuan program beras sejahtera bagi masyarakat yang berpendapatan rendah belum dapat dikatakan mensejahterakan ketahanan pangan.

#### **b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Kategori Mampu**

Dalam mensukseskan program beras sejahtera ini sebenarnya diperlukan kesadaran dari masyarakat yang dalam kategori mampu agar tidak lagi mengambil jatah bantuan beras sejahtera walaupun data pemerintah data dirinya tercantum sebagai penerima bantuan Rastra, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mempunyai lahan pertanian yang luas masih meminta jatah bantuan Rastra.

Dalam wawancara lebih lanjut dengan Ibu Husnul (Putrinya Bu Hajjah) beliau ini tergolong orang yang memiliki lahan sawah dan kebun yang cukup luas dan masih menanyakan bantuan beras

sejahtera pada perangkat desa, sebagaimana yang telah dikatakannya bahwa:

“Kalau saya tetap bertanya pada pak kasun atau pada rt nya, kan biasanya kalau dulu pembagian raskin itu disamaratakan, tapi sekarang malah dipilih-pilih ibu saya (bu hajjah/haji) kan selalu dapat begitupun dengan saya selalu dapat, saya selalu bertanya tentang beras itu agar selalu dapat kalau gak ditanyakan pada kasunnya takut gak dapat lagi nanti”.<sup>91</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Holifah, beliau ini mengatakan:

“Saya sudah bertanya pada pak kasun, kok sekarang tidak seperti raskin, kok sekarang sudah tidak dapat, kok cuma sedikit orang yang dapat. Ternyata katanya sekarang ini programnya beda dengan yang raskin, jadi sekarang dipilih-pilih yang dapat bantuan.”<sup>92</sup>

Disisi lain Ibu Raudah juga mengatakan bahwa:

“Saya juga sempat bertanya pada pak rt, kenapa sekarang kok tidak seperti raskin yang semuanya mendapatkan beras itu, padahal dulu kan bayar meski murah, lah sekarang udah gratis tapi malah tidak dapat, dan ternyata katanya pak rt sekarang programnya sudah beda dengan raskin, jadi yang dapat hanya sedikit tidak semua orang dapat.”<sup>93</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui kevalidan data bahwa masih banyaknya masyarakat yang tergolong mampu masih mengharapkan bantuan tersebut. serta juga dapat diketahui bahwa mereka yang dalam kategori mampu masih

<sup>91</sup>Husnul, Wawancara, Gunungmalang, 30 Mei 2018.

<sup>92</sup>Holifah, Wawancara, 30 Mei 2018.

<sup>93</sup>Raudah, Wawancara, 16 Oktober 2018.

menanyakan tentang pembagian program beras sejahtera dan masih mengharapkan agar dapat bantuan dari pemerintah.

Padahal kalau kita lihat dari segi kemampuan dalam perekonomiannya beliau ini tergolong orang yang berada dan berkecukupan, akan tetapi beliau ini tetap meminta dikarenakan dari segi pengetahuan atau pendidikan beliau ini sangat minim, sehingga kurang paham terhadap program beras sejahtera.

Minimnya kesadaran bagi masyarakat yang dalam kategori mampu semakin menambah kurangnya kesejahteraan atau ketahanan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu, sebab banyak diantara mereka yang tetap minta bagian bantuan rastra. Serta juga adanya data yang mengarah pada keluarga sejahtera.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Pembahasan ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Efektifitas Sistem Distribusi Program Beras Sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe.

Adapun data-data yang akan dibahas oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian ini, maka untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba untuk membahasnya, yaitu:

### **1. Efektifitas Sistem Distribusi Program Beras Sejahtera di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe.**

Efektifitas distribusi program beras sejahtera di Desa Gunungmalang masih belum begitu efektif, hal ini karena disebabkan dari pihak perum BULOG sendiri yang terkadang mengalami keterlambatan. Artinya terkadang dalam satu bulan tidak ada pendistribusian samasekali, jika sudah seperti ini maka pada bulan berikutnya akan ada distribusi BULOG sebanyak dua kali.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi di Desa Gunungmalang pemerintah desa selaku sebagai pelaksana distribusi akhir pada masyarakat telah melaksanakan kewajibannya mendistribusikan, serta membuat kebijakan demi menjaga keseimbangan di masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

#### **a. Keterlambatan Distribusi/Tidak Tepat Waktu**

Keterlambatan pendistribusian beras sejahtera Di Desa Gunungmalang semata-mata karena memang dari pihak penyelenggara pusat atau perum BULOG sendiri yang mengalami keterlambatan pengiriman ke titik distribusi akhir, yaitu pemerintah desa. Keterlambatan distribusi program beras sejahtera ini murni bukan keteledoran pemerintah

desa melainkan dari pihak perum BULOG sendiri yang terkadang mengalami keterlambatan distribusi.

Apabila mengalami keterlambatan distribusi maka pada bulan berikutnya akan ada sistem distribusi dua kali dalam satu bulan dengan jumlah beras 10 kilo gram dalam satu kali distribusi, dengan total 20 kilo gram dalam satu bulan dengan dua kali distribusi.

Bansos Rastra diberikan dalam bentuk beras fisik dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kuantitas beras yang disalurkan adalah sebesar 10 kg dengan kualitas beras medium, yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen.<sup>94</sup> Akan tetapi pada kenyataannya beras yang didistribusikan di lapangan terkadang berbau dan patah-patah, hal ini juga kurang tepat dengan apa yang telah disampaikan oleh pedoman petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera.<sup>95</sup>

Keterlambatan distribusi ini kurang sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakis Miskin, yang mana beliau telah mengatakan bahwa “diharapkan penyakuran Bansos Rastra secara rutin setiap tanggal 25 setiap bulannya, kecuali pada wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis maupun transportasi serta keterbatasan lainnya”. Jika pernyataan tersebut dianalisis dengan kenyataan yang terjadi di Jember sepertinya

<sup>94</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta. 2018). 19.

<sup>95</sup>Obsrvasi & wawancara, Gunungmalang, Mei 2018.

kurang tepat, karena Jember khususnya Desa Gunungmalang tidaklah demikian, dari segi geografis dan transportasi daerah ini tidaklah sulit dan dari segi prasarana telah cukup memadai untuk dilalui alat transportasi.

Pada prinsipnya periode penyaluran Bantuan Beras Sejahtera dilakukan setiap bulan, yaitu pada setiap tanggal 25 akan tetapi kadangkala mengalami keterlambatan. Hal ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam buku pedoman umum subsidi pangan, yang mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan program beras sejahtera dan bantuan program pangan non tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian atau Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya. sehingga dapat dicapai hasil yang efektif, sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pelaksana distribusi beras sejahtera di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.<sup>96</sup>

Pada pelaksanaan yang dilakukan pada titik penyaluran tingkat akhir atau ke desa/kelurahan tidaklah efektif seperti apa yang disampaikan dalam buku pedoman tersebut. mengapa demikian, karena tidaklah setiap bulan didistribusikan dan terkadang mengalami keterlambatan distribusi.

Sebagai acuan bersama bahwa dalam petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera telah disebutkan bahwa, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program beras sejahtera

---

<sup>96</sup>Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra). (Jakarta Pusat: 2017). 14.

agar dapat diberikan dalam bentuk beras sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan biaya harga/tebus.<sup>97</sup>

Penyaluran beras sejahtera ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), serta Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan nasional.<sup>98</sup>

Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan beras sejahtera kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bertanggungjawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan sosial (*Sosial Protektion*), dimana kebijakan program beras sejahtera termasuk di dalamnya. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang akan mendapatkan beras sejahtera.<sup>99</sup> Akan tetapi kebijakan pemerintah mengenai program beras sejahtera ini masih belum efektif seluruhnya, karena masih adanya keterlambatan pendistribusian dan hal ini tentunya juga berakibat pada kurang efektifnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat

---

<sup>97</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta Pusat 2018). 1.

<sup>98</sup>Pedoman Umum Subsidi rastra, (jakarta, 2017). 6.

<sup>99</sup>Pedoman Umum Subsidi rastra, (jakarta, 2017). 2-3.

miskin yang banyak mengharapkan dengan bantuan program beras sejahtera.

**b. Kurang Tepat Sasaran (Objek Penerima)**

Pada pelaksanaan distribusi program beras sejahtera di desa gunungmalang masih tetap menggunakan data penerima yang lama yaitu data yang tahun 2011. Meski telah diajukan data calon penerima bantuan program beras sejahtera yang baru, akan tetapi sampai saat ini pengajuan tersebut belum keluar dari pihak pemerintah atau pihak pelaksana pemerintah kabupaten.

Sejak dari tahun 2013 mengajukan calon penerima bantuan beras sejahtera yang baru yang sudah benar-benar valid hingga 2018 ini data tersebut tetap tidak turun. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.841, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 11.86 Kepala Keluarga (KK). Dari sekian banyak penerima bantuan program beras sejahtera ini dengan data tetap yang tahun 2011. Data penerima ini tidak akan pernah valid jika dari pihak BPS tidak turun langsung mengecek keadaan masyarakat yang sebenarnya di lapangan.<sup>100</sup> Jika mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang sebenarnya untuk mendapatkan bantuan beras sejahtera ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan rastra<sup>101</sup>, yaitu:

- a. Dinding rumah memakai anyaman bambu atau gedek.
- b. Jenis lantai rumah terbuat dari tanah atau plesteran biasa.

---

<sup>100</sup>Observasi & Wawancara, Gunungmalang, Mei 2018

<sup>101</sup>Observasi & Wawancara, Gunungmalang, Mei 2018.

- c. Tidak memiliki rumah sendiri atau hanya rumah warisan dari orang tuanya.
- d. Tidak memiliki lahan pertanian seperti sawah atau kebun.
- e. Hanya berprofesi sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan tungku atau kayu bakar.
- g. Tidak mampu membayar biaya berobat ke dokter/bidan/puskesmas.
- h. Jarang sekali mengkonsumsi daging dalam kehidupan sehari-harinya.

Kenyataan yang sebenarnya dilapangan tidak semua penerima bantuan program beras sejahtera ini sesuai dengan kriteria tersebut. Hal ini tentunya tidaklah sesuai dengan tinjauan efektifitas, dimana dalam tinjauan efektifitas harus mencapai tujuan, sedangkan agar tujuan pencapaian akhir terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan arti periodisasainya.<sup>102</sup>

Pencapaian tujuan program beras sejahtera ini dapat dikatakan belum maksimal, karena sampai saat ini masih banyak ketidak tepatan sasaran penerima bantuan program beras sejahtera, sedangkan dari pihak pemerintah sendiri kurang cepat tanggap dalam memperbarui data keluarga penerima bantuan. Dan hal ini menjadi kendala bagi masyarakat

<sup>102</sup>Fraike Rumondor, *Efektifitas Program Beras Sejahtera dalm Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Minahasa Selatan*. 7.

yaitu karena adanya ketidak tepatan penerima sehingga bantuan program beras sejahtera ini banyak mengarah pada masyarakat yang mampu dan hal ini belum ditindak lanjuti oleh pemerintah yang seharusnya tegas dalam mendata keluarga yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Bantuan sosial beras sejahtera bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.<sup>103</sup> Akan tetapi bantuan ini masih ada beberapa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan program beras sejahtera, karena tidak semua penerima bantuan program beras sejahtera ini miskin atau tidak mampu. Karena pada kenyataannya dilapangan masih banyak ditemukan penerima bantuan program yang tidak layak atau masuk kategori mampu.

Program bantuan beras sejahtera ini agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah, yaitu agar dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, yang sehingga dapat bisa mengurangi pengeluarannya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Agar hal ini dapat benar-benar efektif, maka perlu adanya pendataan ulang pada masyarakat agar tidak lagi salah sasaran penerima bantuan program beras sejahtera.

Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari ketidaktepatan sasaran penerima. Karena menurut

---

<sup>103</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta Pusat: 2018). 1.

pemantauan yang peneliti lakukan dilapangan, ada beberapa ketidaktepatan penyaluran distribusi beras sejahtera, yang diantaranya adalah mengenai salah sasaran. Program beras sejahtera yang seharusnya disalurkan pada masyarakat yang benar-benar tidak mampu ternyata masih ada beberapa yang mengarah pada keluarga yang masuk dalam kategori mampu.

Salah sasaran ini banyak terjadi karena disebabkan oleh turunnya data penerima bantuan yang dari pemerintah pusat sendiri masih ada beberapa data yang memang mengarah pada keluarga yang dalam kategori mampu, sehingga hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadi ketidak efektifan atau kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program beras sejahtera.

Hal semacam ini terjadi karena disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin sebagai penerima bantuan program beras sejahtera yang tidak cepat diperbarui oleh pihak pemerintah, hal ini terjadi mungkin karena masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, atupun kabupaten/kota, padahal dari pihak pemerintah Desa Gunungmalang sendiri telah mengajukan data penerima bantuan beras sejahtera yang sesuai dengan kriteria, akan tetapi sampai saat ini belum ada perubahan data penerima bantuan yang valid dari pihak pemerintah pusat.

### c. Kebijakan Pengelola Rastra yang Tidak Sesuai Dengan Data

Pemerintah Desa Gunungmalang membuat kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa selaku panitia pelaksana distribusi beras sejahtera ditingkat akhir. Kebijakan yang ditetapkan ini mencakup yang pertama adalah menambah rumah tangga penerima beras sejahtera di luar penerima yang telah terdaftar dalam data penerimaan program beras sejahtera yang sebenarnya.

Adapun dampak dari kebijakan penambahan jumlah penerima beras sejahtera ini berpengaruh pada sistem penerima secara bergantian, dimana masyarakat penerima yang telah meninggal dunia atau sedang berada diperantauan untuk sementara digantikan oleh penerima baru yang tidak terdaftar. Pemerintah Desa telah berinisiatif untuk membuat kebijakan tersebut dalam mendistribusikan program beras sejahtera kepada masyarakat dengan cara didistribusikan secara bergantian pada masyarakat yang kurang mampu serta layak menerimanya, hal ini dilakukan demi keseimbangan serta keamanan di masyarakat, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Apabila tidak diberlakukan demikian maka dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan atau kecemburuan sosial di masyarakat, dengan diberlakukannya sistem penerimaan bantuan beras sejahtera secara bergantian ini dengan harapan agar masyarakat tetap aman dan kondusif dalam bermasyarakat.

Kebijakan pemerintah Desa Gunungmalang ini setelah peneliti analisis dengan teori kebijakan publik, maka hal ini telah membantu

memecah permasalahan yang ada dimasyarakat, dimana pada kenyataan masih banyak kebijakan publik yang memihak orang kaya (*pro-rich*) ketimbang memihak pada orang miskin (*pro-poor*).<sup>104</sup> Dan pemerintah Desa Gunungmalang yang sedikit demi sedikit telah mulai memihak masyarakat yang kurang mampu (*pro-rich*), yaitu dengan memberlakukan sistem penyaluran beras sejahtera dengan cara bergantian bagi mereka yang kategori kurang mampu tetapi namanya tidak tercantum didaftar penerima bantuan beras sejahtera.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungmalang ini dapat disesuaikan dengan teori kebijakan publik yang menjelaskan bahwa, kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya publik, demi kepentingan rakyat banyak serta masyarakat.<sup>105</sup> Melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungmalang ini telah mulai adanya keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu yang telah memberlakukan sistem pembagian beras sejahtera secara bergantian bagi masyarakat yang kurang mampu yang tidak terdaftar namanya di data penerima bantuan.

---

<sup>104</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Mengggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bnadung: ALFABETA. 2009). 39.

<sup>105</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Mengggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bnadung: ALFABETA. 2009). 33.

Pemerintah Desa Gunungmalang sadar akan tujuan dari adanya program beras sejahtera ini, yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium sejumlah 10 kg tanpa dikenakan harga/biaya tebus dengan periode penyaluran sesuai kebijakan pemerintah.<sup>106</sup>

Pemerintah Desa Gunungmalang memberlakukan kebijakan dengan sistem penerimaan secara bergantian, dimana penerima bantuan beras sejahtera yang dalam kategori mampu atau pihak penerimanya meninggal dunia atau sedang berada diperantauan. maka berasnya disalurkan pada masyarakat miskin lainnya yang tidak terdaftar namanya didata penerima bantuan program bersa sejahtera.

Hal ini dapat memberikan rasa aman pada masyarakat miskin lain yang tidak terdaftar didata penerima bantuan, karena dengan hal ini mereka masih punya harapan untuk dapat bantuan walaupun masih menunggu giliran. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungmalang untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dimasyarakat agar mereka tidak merasa iri serta tidak merasa dipilah-pilih.

Pemerintah Desa Gunungmalang berharap untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyatakat yang masuk dalam kategori kurang mampu atau miskin. Disamping itu juga dengan harapan dapat mengurangi

---

<sup>106</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta Pusat:2018). 3.

beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Selain itu juga kebijakan dari pemerintah Desa Gunungmalang diharapkan agar dapat untuk meningkatkan atau membuka akses pangan bagi keluarga yang kurang mampu dalam rangka peningkatan ketahanan pangan ditingkat desa ataupun pada keluarga penerima bantuan melalui kebijakan dari pemerintah Desa yaitu dengan sistem penerima bergantian bagi masyarakat kurang mampu yang tidak tercantum namanya pada data penerimaan program beras sejahtera.

Banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam data penerima bantuan program beras sejahtera serta rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam kategori mampu yang masih meminta agar program beras sejahtera dibagi samarata. Maka pihak pemerintah berinisiatif untuk memberlakukan sistem penerima bantuan secara bergantian bagi mereka yang tidak terdaftar didata penerima bantuan beras sejahtera.

Demikian tetap tidak menyalahi peranturan yang ada dari pemerintah, sebab kuota beras sejahtera yang diberikan dengan sistem bergantian tersebut diambilkan dari jatah penerima sebelumnya yang sudah meninggal dunia atau penerima sebelumnya sedang berada diperantauan, sehingga inisiatif pemerintah Desa Gunungmalang unntuk

memberikannya pada masyarakat lain yang kurang mampu untuk sekedar mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok lainnya.

#### **d. Pemahaman Sosialisasi Program Rastra yang Kurang Tepat**

Diberlakukannya sistem distribusi beras sejahtera secara bergantian, maka pemerintah Desa Gunungmalang beserta perangkat-perangkat desa lainnya telah melaksanakan sosialisasi ini kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta sekaligus edukasi agar masyarakat tidak merasa dipilah-pilih dalam hal pembagian beras sejahtera tersebut. Sosialisai ini dilakukan mulai dari tingkat kepala dusun hingga rt/rw setempat guna untuk memberikan arahan serta pemahaman kepada masyarakat.

Minimnya tingkat pendidikan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman atau sosialisai yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Karena dengan minimnya tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami program beras sejahtera yang sebetulnya sangat diperuntukkan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah atau kurang mampu.

Sosialisasi program beras sejahtera yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungmalang ini, ketika dianalisis dengan teori kesejahteraan sosial, pemerintah Desa Gunungmalang telah melaksanakan pasal 27 dan 34 UUD 1945, dan UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi menjamin bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar

dan miskin,<sup>107</sup> sosialisasi yang diberikan ini dengan maksud dan tujuan adalah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat yang mampu tidak lagi menuntut untuk mendapatkan program beras sejahtera secara merata, karena pada hakikatnya program bantuan beras sejahtera ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Sampai saat ini jika dilihat dalam penelitian, pemerintah dan masyarakat kurang bekerja sama dalam pelaksanaan program beras sejahtera.<sup>108</sup> Karena dari pemerintah pusat sendiri kurang memberikan informasi mengenai program ini kepada masyarakat, akibatnya masyarakat yang tidak paham dan tetap mengharapkan bantuan ini disamaratakan.

Secara teoritis hasil temuan kurangnya pemahaman benar-benar kurang efektif, karena dalam tinjauan keefektifan terdapat pencapaian tujuan yang ingin dituju sesuai dengan harapan. Hal ini tentunya tidak berbanding lurus dengan harapan yang ingin dituju, karena dalam hal ini masih dijumpai bahwa pemahaman masyarakat terkait bantuan program beras sejahtera ini masih rendah.

Tujuannya agar pencapaian akhir semakin terjamin dan masyarakat semakin paham, maka perlu adanya sosialisasi secara berkala. Artinya memberikan pemahaman mengenai program beras sejahtera ini kepada masyarakat bahwa program tersebut benar-benar diperuntukkan kepada

---

<sup>107</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. (Bandung: ALFABETA. 2009). 43.

<sup>108</sup>Fraike Rumondor, *Efektifitas Program Beras Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Minahasa Selatan*. 7.

masyarakat yang berpendapatan rendah atau dalam kategori kurang mampu secara perekonomiannya.

Secara teoritis masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi.<sup>109</sup> Cara yang lebih tepat untuk membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam segala hal program-program dari pemerintah yaitu adalah memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Metode seperti ini dapat memberikan pemahaman serta dapat memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses sosialisasi langsung yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, secara bertahap masyarakat dengan sendirinya akan sadar dan mengerti akan mengenai tujuan dari program beras sejahtera. Karena hal ini, proses sosialisasi yang diberikan akan menjadi bagian penting dalam penumbuhan kesadaran bagi masyarakat itu sendiri.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sosialisasi program beras sejahtera tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan organisasi maupun masyarakat. Karena untuk mengukur terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.<sup>110</sup> Hal ini dapat memberikan proses sosialisasi yang baik.

---

<sup>109</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2015). 100.

<sup>110</sup>Fraike Rumondor, *Efektifitas Program Beras Sejahtera dalm Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Minahasa Selatan*. 7.

Adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat, maka dengan demikian dapat diharapkan sosialisasi yang diberikan bisa menumbuhkan kasadaran serta pemahaman yang lebih tepat kepada masyarakat.

Kerjasama dibutuhkan untuk mewujudkan pemahaman sosialisasi yang dapat dipahami, dalam hal tersebut dibutuhkan tuntunan, atau panduan bagi seluruh pihak baik pengelola, pelaksana, pengendali dan pemangku kepentingan lainnya agar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pemanfaatan hingga pengendalian bisa dilaksanakan secara terarah, terencana, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>111</sup> Dengan demikian, jika semua dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar, maka hal tersebut dapat meminimalisir pemahaman sosialisasi pada masyarakat yang kurang tepat.

## **2. Respon Masyarakat Terhadap Sasaran Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunungmalang.**

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, peneliti juga menemukan beberapa respon dari masyarakat terkait sistem pelaksanaan distribusi beras sejahtera di Desa Gunungmalang, berikut beberapa respon dari masyarakat terkait sasaran program beras sejahtera:

---

<sup>111</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, (Jakarta Pusat:2018). iv.

#### a. Persepsi Masyarakat Terhadap Kurang Tepatnya Sasaran penerima Rastra

Persepsi masyarakat terhadap program beras sejahtera adalah mayoritas kurangmengetahui, artinya pengertian masyarakat tentang program beras sejahtera masih kurang. Persepsi masyarakat yang bersifat kurang memahami ini dapat disimpulkan karena kurang pahami mereka pada sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah desa selaku pelaksana penyelenggara program pada masyarakat.

Kurangnya pemahaman terhadap persepsi ini ketika dianalisis dengan tinjauan efektivitas yang mana dalam tinjauan tersebut banyak program program pemerintah yang berupaya membangun basis masyarakat yang lebih kuat untuk aspek tunggal eksistensi manusia.<sup>112</sup> Akan tetapi dalam hal ini banyak masyarakat yang kurang memahami sehingga banyak diantara mereka yang beranggapan bahwa program-program tersebut untuk semua rakyat tanpa mereka sadari bahwa program tersebut hanya dikhususkan pada masyarakat kurang mampu semata.

Disisi lain banyak program pengembangan ekonomi masyarakat berjalan atas dasar asumsi bahwa dari pengembangan ekonomi, semua semua aspek lainnya akan mengikuti. Oleh sebab itu, mereka mengabaikan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.<sup>113</sup> Kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mereka abaikan adalah kebutuhan

---

<sup>112</sup>Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 409.

<sup>113</sup>Ibid, 410.

masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang sangat butuh terhadap bantuan beras sejahtera tersebut, akan tetapi semua lapisan masyarakat banyak yang menginginkan agar bantuan tersebut dapat dibagikan dengan samarata.

Keadaan ini tentunya akan menghambat individu dan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih bagi mereka yang tergolong kelompok masyarakat rentan yang mudah goyah diterpa perubahan sosial.<sup>114</sup> Oleh sebab itu, program-program dari pemerintah kedepan harus lebih tepat sasaran.

Hal ini jika ditinjau dari teori efektivitas maka belum sesuai, karena harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi. Dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat aktif dalam proses-proses dalam kegiatan masyarakat dan juga individu. Sementara masyarakat yang ada di Desa Gunungmalang ini belum sesuai dengan tinjauan tersebut, karena masih banyak diantara mereka yang kurang mengetahui mengenai kurang tepatnya sasaran program-program dari pemerintah, termasuk program beras sejahtera tersebut.

Pada tahun ini merupakan awal dari peralihan sistem program beras sejahtera yang sebelumnya bantuan bersubsidi menjadi bantuan non tunai atau bebas biaya tebus, dan hal tersebut masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Sehingga masih minim pengetahuan dari masyarakat terkait sistem yang baru ini.

---

<sup>114</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan sosial*. (Bandung: ALFABETA. 2015). 60.

Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga kurang mampu tidak luput dari salah sasaran program yang telah direncanakan, karena masih banyak diantara masyarakat yang mampu masih mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga hal ini membuat persepsi dimasyarakat yang beredar bahwa bantuan tersebut harus disamaratakan lagi seperti bantuan program beras miskin. Padahal untuk program beras sejahtera diharapkan lebih tepat sasaran, akan tetapi pada kenyataannya masih tetap seperti dulu yaitu masih banyak ketidaktepatan sasaran penerima bantuan program tersebut.

Efektivitas pendistribusian program beras sejahtera ini harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan tidak lagi salah sasaran, karena yang mendapat imbasnya adalah mereka rakyat miskin yang betul-betul mengharapkan atas dapatnya bantuan program beras sejahtera.

#### **b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Kategori Mampu**

Kesadaran masyarakat dalam memahami pembagian program beras sejahtera ini masih sangat rendah, seperti pendapat Jim Ife yang mengutip pendapat Freire, bahwa munculnya kesadaran yang paling kuat dan efektif ketika hal tersebut diletakkan dalam konteks realitas hidup sehari-hari, karena dalam memberikan kesadaran pada masyarakat harus menghubungkan berbagai pengalaman penduduk pada konteks sosial, ekonomi dan juga budaya.<sup>115</sup> Sementara pada

---

<sup>115</sup>Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 584-585.

masyarakat Desa Gunungmalang tingkat kesadarannya masih rendah, hal ini dapat kita lihat keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dimana masyarakat yang sudah dalam kategori mampu masih menuntut hak agar mendapatkan pembagian program beras sejahtera, karena mereka beranggapan bahwa program bantuan beras sejahtera maupun program-program lainnya adalah untuk semua lapisan masyarakat.

Hal ini juga yang dapat mengakibatkan masyarakat miskin yang seharusnya benar-benar berhak mendapatkan bantuan program beras sejahtera tersebut menjadi tidak dapat karena harus menunggu giliran penerimaan program beras sejahtera antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Dan ini dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah desa untuk menjaga keamanan dan keseimbangan dimasyarakat agar tidak ada rasa kecemburuan sosial.

Kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam program beras sejahtera kurang baik.<sup>116</sup> Mengapa demikian, karena dalam proses pendistribusiannya pada masyarakat masih adanya data yang mengarah pada masyarakat yang mampu, sehingga banyak diantara mereka yang kurang sadar akan program ini dan tetap mengambilnya. Dan pemerintah sendiri harusnya melakukan dan mengecek sendiri apakah data sudah benar-benar sesuai atau

---

<sup>116</sup>Fraike Rumondor, *Efektifitas Program Beras Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Minahasa Selatan*. 8.

tidak, karena tingkat keberhasilan yang dapat dicapai pemerintah dalam program beras sejahtera ini yaitu ketika masyarakat merasa sejahtera dan sudah benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan tinjauan kebijakan publik dalam keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya publik, demi kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat.<sup>117</sup>Dari hal ini dapat diketahui bahwa secara teoritis kenyataan yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan teori kebijakan publik, sebab masih banyak dijumpai rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam hal ini masuk kedalam kategori mampu, akan tetapi masih banyak diantara mereka yang menginginkan agar pembagian program beras sejahtera ini disamaratakan tanpa harus ada pembatas antara masyarakat mampu dan masyarakat miskin.

Permasalahan kebijakan publik di Indonesia bisa dikaji dari rendahnya komitmen dan keberpihakan para pengurus kebijakan dan penyelenggara.<sup>118</sup>karena sampai saat ini belum ada tindakan yang lebih serius dari pihak-pihak penyelenggara program beras sejahtera terkait permintaan atau rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam kategori mampu yang masih ada beberapa diantara mereka yang menuntut hak untuk mendapatkan bantuan program tersebut.

---

<sup>117</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: ALFABETA, 2009).

33.

<sup>118</sup>Ibid,33.

Adanya ketidaktepatan distribusi program beras sejahtera yang banyak mengarah pada masyarakat yang mampu, maka pemerintah Desa Gunungmalang melakukan pendataan penerima yang sesuai dan telah diajukan pada pihak pemerintah daerah atau pusat, akan tetapi hal tersebut belum ada titik terang kevalidan data yang baru yang sesuai dengan harapan pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar tidak lagi ada kesalah-tepatan sasaran program serta dengan harapan agar masyarakat yang dalam kategori mampu tersebut tidak lagi meminta hak untuk mendapatkan bantuan program beras sejahtera.

Tidak sedikit diantara mereka yang menemui para perangkat desa secara langsung yang menuntut hak agar dapat bantuan program beras sejahtera, padahal jika dilihat dari segi perekonomiannya mereka tergolong orang-orang yang berkecukupan. Ini semua terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan program-program pemerintah yang salah satunya adalah beras sejahtera.<sup>119</sup>

Sementara dari pihak pemerintah desa sendiri telah memberi tahu bahwa program beras sejahtera sejatinya hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin.

Akan tetapi pemberitahuan tersebut kurang diserap atau kurang

---

<sup>119</sup>Observasi & wawancara, Gunungmalang, Mei 2018.

dipahami secara maksimal oleh para masyarakat yang masih sering menuntut tersebut.<sup>120</sup>

Hal ini terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat dan untuk membuat kesadaran yang secara gamblang dapat diterima harus membutuhkan proses, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa untuk memunculkan kesadaran yang efektif yaitu ketika hal tersebut diletakkan dalam konteks sehari-hari. Untuk memberikan kesadaran harus menghubungkan berbagai pengalaman baik dari segi pengalaman sosial maupun ekonomi.<sup>121</sup> Apabila hal-hal tersebut dapat diterapkan pada masyarakat yang tingkat kesadarannya masih rendah, maka dapat dipastikan secara perlahan akan paham dengan sendirinya serta tidak akan lagi menuntut agar semua program dari pemerintah dibagi secara samarata dan masyarakat miskin tidak perlu lagi menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan program-program dari pemerintah.

IAIN JEMBER

---

<sup>120</sup>Observasi & wawancara, Gunungmalang, Mei 2018.

<sup>121</sup>Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 584.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian efektifitas program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat kurang mampu di desa gunnungmalang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunungmalang, yaitu secara umum belum efektif sebagaimana beberapa poin kesimpulan berikut:

- a. Keterlambatan distribusi/tidak tepat waktu

kurang efektifnya pendistribusian program beras sejahtera ini karena adanya keterlambatan dari pemerintah pusat selaku pihak penyelenggara pusat ketitik penyelenggara akhir.

- b. Kurang tepat sasaran

belum tepatnya mengenai sasaran penerima program beras sejahtera, ini karena data penerima masih tetap yang tahun 2011 hingga saat ini belum turun data yang baru yang benar-benar sesuai dengan kriteria penerima yang sesungguhnya karena dalam daftar nama penerima tersebut banyak mengarah pada nama-nama yang tergolong mampu.

Namun, ada juga beberapa nama penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria.

c. Kebijakan pengelola rastra yang tidak sesuai dengan data

Pihak pemerintah Desa Gunungmalang memberlakukan sistem penerimaan bergantian pada masyarakat kurang mampu yang namanya tidak terdaftar dipenerima bantuan rastra, bantuan yang diberikan adalah orangnya yang sudah meninggal dunia atau pihak penerimanya sedang berada diperantauan.

d. Pemahaman sosialisasi program rastra yang kurang tepat

Sosialisasi program beras sejahtera yang diberikan oleh pemerintah Desa Gunungmalang kepada masyarakat tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka, hal ini disebabkan oleh karena banyaknya masyarakat yang sudah berumur dan minimnya tingkat pemahaman mereka.

2. Respon masyarakat terhadap sasaran program beras sejahtera di desa gunungmalang yaitu banyaknya keluhan dari masyarakat desa gunungmalang sendiri terkait pembagian penerimaan program beras sejahtera yang sarannya banyak mengarah kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori mampu, sedangkan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan program tersebut harus menunggu giliran karena nama mereka tidak terdaftar didata yang turun dari pemerintah pusat, dan berikut beberapa kesimpulan dari respon-respon tersebut:

a. Persepsi masyarakat terhadap kurang tepatnya sasaran penerima rastra

Banyaknya keluhan bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang melaporkan pada RT/RW setempat bahkan pada kepala dusun juga, hal ini mereka lakukan agar bantuan program beras sejahtera ini disamaratakan dan benar-benar tepat sasaran pada masyarakat yang kurang mampu.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kategori mampu

Banyaknya ketidaksadaran masyarakat yang mampu secara pemenuhan kebutuhan ekonominya yang masih meminta bagian program beras sejahtera tersebut.

**B. Saran**

Dari kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah kota/kabupaten seharusnya penetapan keluarga penerima bantuan program beras sejahtera haruslah benar-benar diperhatikan dan diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu, hal ini untuk mengurangi kesalahan tepatan sasaran program beras sejahtera. Serta pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi program penerima beras sejahtera agar masyarakat lebih mengetahui tentang pelaksanaan dan ketepatan penerimanya. Pemerintah juga harus mengontrol serta mengawasi pendistribusian beras agar tidak ada lagi keterlambatan distribusi beras setiap bulannya.

## 2. Bagi Keluarga Penerima Manfaat/KPM

Bagi masyarakat penerima bantuan program beras sejahtera harus lebih tahu dan sadar bahwa program tersebut benar-benar diperuntukkan buat masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk diberikan secara samarata dengan masyarakat yang mampu.

## 3. Bagi IAIN Jember

Bagi para akademisi IAIN Jember penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti selanjutnya bisa melihat dari aspek yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyiron. Abdul Basith. *Mutiara Hadits Budiluhur*. Surabaya. Bintang Terang.
- Djamal. 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahrudin, Adi. 2014, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasan, Tholchah Muhammad dkk. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang Kerjasama dengan Visipress.
- Ife, Jim. 2016, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok&Soebianto, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Moelong, Lexy J. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Chalid. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rumondor, Fraike, *Efektifitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan & perlindungan Sosial di Indonesia menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, Rusydi dan Holid, Mohammad. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eIKAF).

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Penyusun IAIN JEMBER. 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Usmanismail, asep. 2012. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati.

W. Creswell, John. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[https://nasional.kompas.com/read/2018/01/03/tahun ini pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-di-bawah-10-persen](https://nasional.kompas.com/read/2018/01/03/tahun%20ini%20pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-di-bawah-10-persen). diakses pada 03-04-2018, pukul 19.46. Wib.

<https://subhiceria.wordpress.com/tafsir-al-maun>. Diakses pada 03-04-2018, pukul 19.15. Wib.

[www.bulog.co.id/sekilas-raskin.php](http://www.bulog.co.id/sekilas-raskin.php). diakses pada 16-11-2017, pukul 06.15. Wib.

IAIN JEMBER

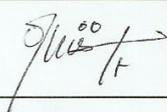
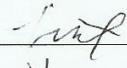
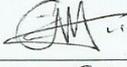
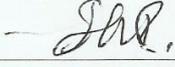
### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

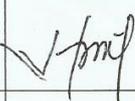
Nama : Lisnan Baihaki

Nim : 082144018

Judul : Efektifitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe

Lokasi : Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN PENELITIAN	PARAF
1	26 April 2018	Menyerahkan surat ijin penelitian sekaligus wawancara dengan Bapak Imam Sutaji selaku sekretaris Desa Gunungmalang	
2	27 April 2018	Wawancara dengan Ibu Erna Dwi Setiarini selaku kepala Desa Gunungmalang	
3	8 Mei 2018	Meminta data profil Desa sekaligus wawancara dengan Bapak Nurul selaku Kasi Pelayanan Desa Gunungmalang	
4	9 Mei 2018	Wawancara dengan Bapak Khoiri selaku Kasi Pelayanan Desa Gunungmalang	
5	30 Mei 2018	Wawancara dengan Ibu Husnul selaku masyarakat Desa Gunungmalang	
6	30 Mei 2018	Wawancara dengan Ibu Holifah selaku masyarakat Desa Gunungmalang	
7	20 Juni 2018	Wawancara dengan Ibu iseh selaku masyarakat Desa Gunungmalang	
8	21 Juni 2018	Wawancara dengan Bapak Natun selaku masyarakat Desa Gunungmalang	
9	25 Juni 2018	Wawancara dengan Ibu Burasi selaku masyarakat Desa Gunungmalang	
10	27 juni 2018	Wawancara dengan Ibu Yusda selaku masyarakat Desa Gunungmalang	
11	3 September 2018	Wawancara dengan Bapak Basri selaku 009 Desa Gunungmalang	
12	3 September	Wawancara dengan Bapak Hasyim	

	2018	selaku ketua RT 003 Desa Gunungmalang	
13	6 September 2018	Wawancara dengan Bapak Sujono sekaligus dokumentasi selaku Kepala Dusun Gayasan Desa Gunungmalang	
14	15 September 2018	Wawancara dengan Ibu Raudah selaku masyarakat Desa Gunungmalang	

## FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Erna Dwi Stiarini selaku Kepala Desa Gunungmalang



Wawancara dengan Bapak Imam Sutaji selaku Sekretaris Desa Gunungmalang



Wawancara dengan Bapak Khoiri selaku Kasi Pelayanan



Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Kepala Dusun Gayasan Desa  
Gunungmalang



Wawancara dengan Bapak Basri selaku Ketua RW 009 Desa Gunungmalang



Wawancara dengan Bapak Hasyim selaku Ketua RT 003 Desa Gunungmalang



Wawancara dengan Ibu Yusda selaku masyarakat Desa Gunungmalang



Wawancara dengan Ibu Husnul selaku Masyarakat Desa Gunungmalang



Wawancara dengan Ibu Iseh selaku masyarakat Desa Gunungmalang



### DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Jabatan
1	Erna Dwi setiarini, S. Pd	Kepala Desa Gunungmalang
2	Imam Sutaji	Sekretaris Desa Gunungmalang
3	Khoiri	Kasi Pelayanan Desa Gunungmalang
4	Nurul	Kasi Pelayanan Desa Gunungmalang
5	Sujono	Kepala Dusun Gayasan Desa Gunungmalang
6	Basri	Ketua RW 009 Dusun Gayasan Desa Gunungmalang
7	Hasyim	Ketua RT 003 Dusun Gayasan Desa Gunungmalang
8	Husnul	Masyarakat Desa Gunungmalang
9	Holifah	Masyarakat Desa Gunungmalang
10	Iseh	Masyarakat Desa Gunungmalang
11	Natun	Masyarakat Desa Gunungmalang
12	Burasi	Masyarakat Desa Gunungmalang
13	Yusda	Masyarakat Desa Gunungmalang
14	Raudah	Masyarakat Desa Gunungmalang



## BIODATA PENULIS



- Nama : Lisnan Baihaki
- Tempat Tanggal lahir : Jember, 17 Mei 1991
- Alamat : Dusun Gayasan RT 003 RW 009 Desa  
Gunungmalang Kec. Sumberjambe Kab. Jember.
- Fakultas : Dakwah
- Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat
- Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- Riwayat Pendidikan :
1. SDN Gunungmalang II
  2. MTs Raudlatul Ulum Ledokombo
  3. MA Raudlatul Ulum Ledokombo
  4. Menempuh IAIN Jember
- Riwayat Organisasi :
1. Bendahara Osis MTs Raudlatul Ulum Ledokombo
  2. Pramuka MA Raudlatul Ulum Ledokombo
  3. PMII Rayon Fakultas Dakwah
  4. Pengurus HMPS PMI Fakultas Dakwah
  5. Pengurus PMII Rayon Dakwah